

**ANALISIS KONTROVERSI PERLUASAN KEWENANGAN
PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

**OLEH
SHIFA'AL-ADAWIYAH
NPM : 1423020010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
KONSENTRASI HUKUM BISNIS DAN KEUANGAN SYARI'AH**



**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1437 H/ 2016 M**

**ANALISIS KONTROVERSI PERLUASAN KEWENANGAN
PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

**OLEH
SHIFA'AL-ADAWIYAH
NPM : 1423020010**

PEMBIMBING I: PROF. DR. H. SUHARTO, SH., MA.

PEMBIMBING II: DR. ALAMSYAH, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
KONSENTRASI HUKUM BISNIS DAN KEUANGAN SYARIAH**



**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1437 H/ 2016 M

PERNYATAAN ORISINALITAS/ KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shifa' Al-Adawiyah

Npm : 1423020010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “ANALISIS KONTROVERSI PERLUASAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH”, adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 14 Juni 2016

Yang menyatakan,

Shifa' Al-Adawiyah

NPM. 1423020010

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Namun dalam Undang-Undang yang lahir kemudian yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ternyata Peradilan Umum sebagai lembaga litigasi tetap diberi kompetensi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Dengan demikian, telah terjadi *choice of court* yang mengarah pada dualisme kompetensi dalam mengadili oleh dua lembaga litigasi yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran pakar hukum yang setuju terhadap perluasan bidang ekonomi syariah menjadi kompetensi peradilan umum? bagaimana pemikiran pakar hukum yang setuju terhadap perluasan bidang ekonomi syariah menjadi kompetensi peradilan agama? serta bagaimana perspektif hukum Islam tentang kompetensi bidang tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam terhadap pemikiran pakar hukum yang setuju perluasan kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi peradilan umum ataupun peradilan agama serta bagaimana pula perspektif hukum Islam tentang kompetensi bidang tersebut. Manfaat dari penelitian ini secara keseluruhan diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan mengenai perluasan kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada pengadilan agama.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yang mempunyai korelasi dengan perluasan wewenang Peradilan Agama di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data primer.

Berdasarkan analisis maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Peradilan Umum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang yang lahir lebih dulu yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, penyelesaian perkara ekonomi syariah oleh Peradilan Agama sangatlah tepat karena tujuan dan praktik akad yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dan oleh karena itu pengadilan negeri tidaklah sesuai untuk menangani sengketa ekonomi syariah karena tidak memiliki dasar-dasar hukum penyelesaian perkara sebagaimana yang dikehendaki pihak-pihak yang terikat dalam akad syariah melainkan hal tersebut hanya digunakan pada lembaga Pengadilan Agama.

Untuk itu saran yang mendukung adalah perlu kiranya kesungguhan dari setiap elemen, pihak perbankan syariah dan para pelaku bisnis syariah untuk menetapkan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang berkompeten menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta tidak perlu ragu pula apabila mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi syariah untuk diselesaikan pada Peradilan Agama.

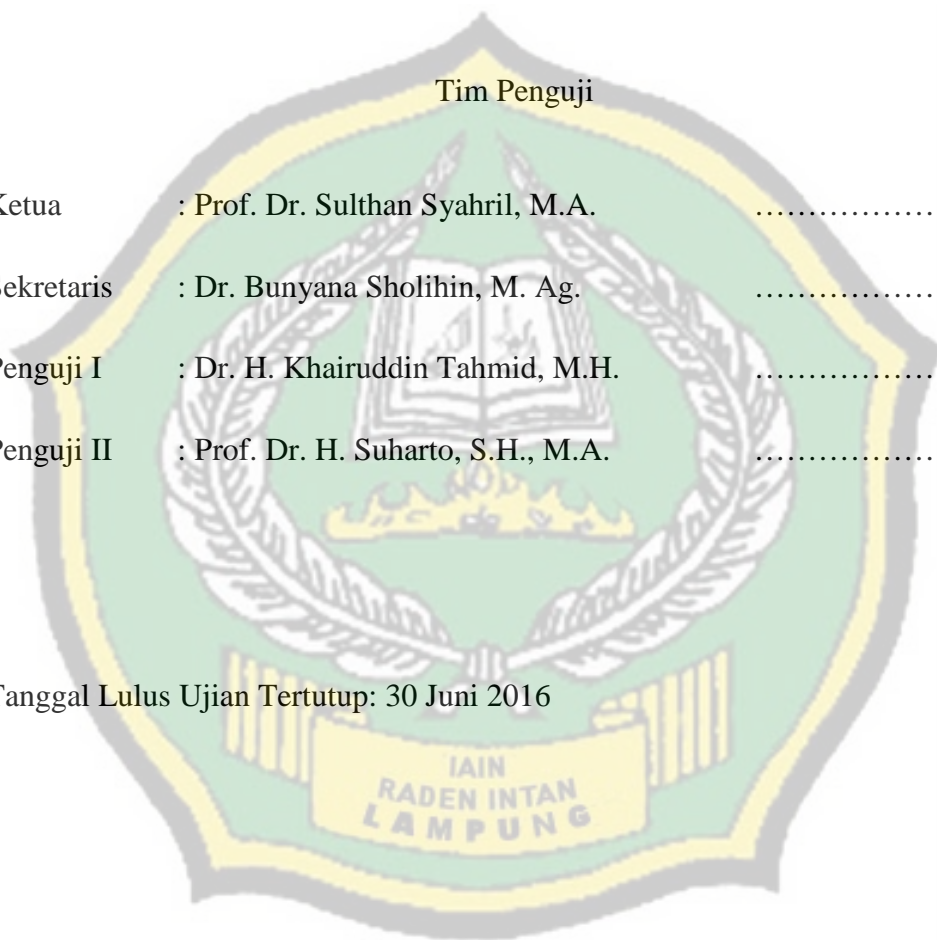
PERSETUJUAN

Tesis ini berjudul: ANALISIS KONTROVERSI PERLUASAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH, ditulis oleh: Shifa'Al-Adawiyah, NPM: 1423020010 telah diujikan dalam Ujian Tertutup dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua	: Prof. Dr. Sulthan Syahril, M.A.
Sekretaris	: Dr. Bunyana Sholihin, M. Ag.
Penguji I	: Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.
Penguji II	: Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.

Tanggal Lulus Ujian Tertutup: 30 Juni 2016



PENGESAHAN

Tesis ini berjudul: ANALISIS KONTROVERSI PERLUASAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH, ditulis oleh: Shifa'Al-Adawiyah, NPM: 1423020010 telah diujikan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Institut gama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Sulthan Syahril, M.A.

Sekretaris : Dr. Bunyana Sholihin, M. Ag.

Penguji I : Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.

Penguji II : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.

Direktur Program Pascasarjana
IAIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag

NIP. 196010201988031005

Tanggal Lulus Ujian Terbuka: 05 Juli 2016

PEDOMAN TRANSLITERASI

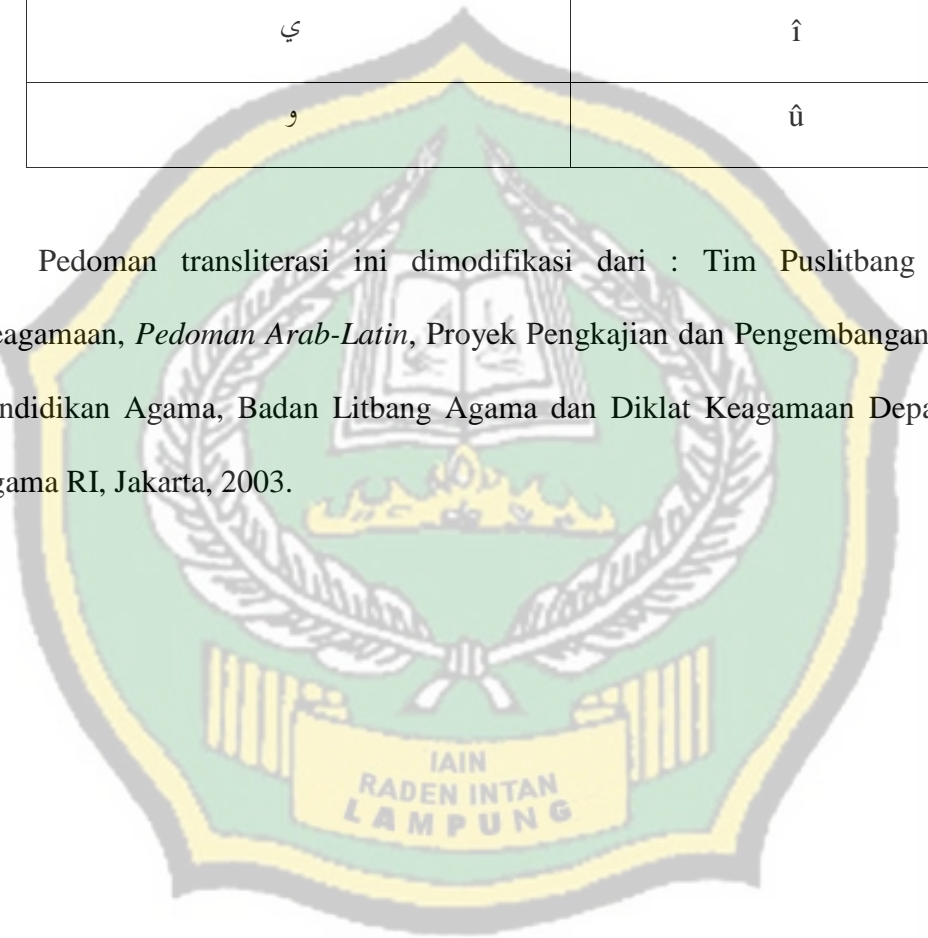
Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث		غ	g
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ		م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص		ي	y
ض	D		

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

<i>Harokat dan Huruf</i>	<i>Huruf dan Tanda</i>
ا ی	â
ي	î
و	û

Pedoman transliterasi ini dimodifikasi dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, *Pedoman Arab-Latin*, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kekuatan, kesehatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam penulisan tesis yang berjudul: **ANALISIS KONTROVERSI PERLUASAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah, menuju ke zaman penuh hikmah dan ilmu pengetahuan.

Tesis ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung. Guna memperoleh gelar Magister Syariah. Upaya proses tesis ini, telah menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sesuai dengan rencana, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor IAIN Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.
4. Prof. Dr. H.Suharto, S.H., M.A., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan secara teliti kalimat demi kalimat sehingga membuat semangat penulis dalam penyusunan tesis ini, semoga ilmu yang diberikan berkah.
5. Dr. Alamsyah, M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk kesempurnaan dan penyelesaian tesis ini.
6. Kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai, Ayah Pinuri Samsi dan Ibu Aisyah yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan demi keberhasilan

anak-anaknya, kakakku Muhammad Yusuf S.STP., M.M., dan Faiza Tullah S.P serta adikku Faizah Dwi Fitri Yani yang selalu menanti keberhasilanku.

7. Bapak dan Ibu Dosen, serta para karyawan Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama menimba ilmu pengetahuan.
8. Ibu pimpinan perpustakaan Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas berupa data kepustakaan sebagai literatur penulisan tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014.
10. Keluarga Besar Sekolah Alam Lampung atas kesempatan waktu dan dukungannya selalu.
11. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan ku yang tak bisa disebutkan satu persatu.
12. Almamaterku Tercinta IAIN Raden Intan Lampung.

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan, baik karena terbatasnya waktu, dana, dan kemampuan penulis maupun karena terbatasnya literatur yang mendukung masalah yang dibahas. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati sangat mengharapkan masukan dan saran-saran dari pembaca yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis mendatang.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman di abad modern.

Bandar Lampung, 14 Juni 2016
Penulis,

Shifa'Al-Adawiyah
NPM. 1423020010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Kajian Pustaka.....	13
D. Tujuan Penelitian	19
E. Manfaat Penelitian	19
F. Kerangka Fikir	20
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	26
 BAB II PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	
A. Pengertian Dan Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia.....	28
1. Pengertian Peradilan Agama	28
2. Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia.....	31
B. Kompetensi Peradilan Agama Di Indonesia	53
1. Pengertian Mengadili	53
2. Dasar Hukum Mengadili	55
3. Syarat-syarat Kompetensi Mengadili.....	70
4. Kompetensi Mengadili	85

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang	1
J. Rumusan Masalah	12
K. Kajian Pustaka.....	13
L. Tujuan Penelitian	19
M. Manfaat Penelitian	19
N. Kerangka Fikir	20
O. Metode Penelitian	23
P. Sistematika Penulisan	26
 BAB II PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	
C. Pengertian Dan Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia.....	28
3. Pengertian Peradilan Agama	28
4. Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia.....	31
D. Kompetensi Peradilan Agama Di Indonesia	53
5. Pengertian Mengadili	53
6. Dasar Hukum Mengadili	55
7. Syarat-syarat Kompetensi Mengadili.....	70
8. Kompetensi Mengadili	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ANALISIS KONTROVERSI PERLUASAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Peradilan Agama di Indonesia terkonsepsi dan tegas disebut serta diakui dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970¹ tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa; Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan; (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer, dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 merupakan Undang-Undang organik sehingga dibutuhkan adanya Undang-Undang lain sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu yang berhubungan dengan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tentang Peradilan Agama baru disahkan setelah 19 tahun Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disahkan. Kemudian, pada tahun 1989, Peradilan Agama disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Cakupan atau batasan Peradilan Agama meliputi beberapa komponen yaitu:

1. Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain/ pihak luar.

¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (awal kebijakan reformasi di bidang hukum), jo, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam perubahan Undang-Undang tersebut bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh empat Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Badan Peradilan Agama sebagai satuan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang meliputi hierarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam struktur organisasi pengadilan.
3. Prosedur perkara di pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural (hukum acara), serta produk-produknya (putusan dan penetapan).
4. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah.
5. Orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara atau sengketa atau para pencari keadilan.
6. Hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam proses peradilan.
7. Adalah penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.

Yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam adalah:

1. Landasan teologis-filosofis peradilan Islam. Peradilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan Allah dalam komunitas umat.
2. Secara yuridis, Peradilan Agama berkembang mengacu kepada konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia.
3. Secara historis, menurut para fuqaha, Peradilan Agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah SAW.
4. Secara sosiologis menunjukkan bahwa Peradilan Agama merupakan produk interaksi antara elite Islam dan elite politik yang didukung serta dikembangkan oleh masyarakat Islam Indonesia sejak lebih satu abad silam.

Ketika empat landasan tersebut terpenuhi, Peradilan Agama dapat disebut sebagai Peradilan Islam. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam mengenai perdata tertentu.

Penegakan keadilan merupakan perintah Allah kepada Rasul dan seluruh orang-orang beriman, sebagaimana dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا ۖ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النِّسَاء: ١٣٥)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa: 135)²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: ٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)³

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 dijelaskan kekuasaan Peradilan Agama ialah bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di

² Ahsin Sakho Muhammad, *Mushaf Maqamat*, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2013, Juz 14, h. 100.

³ *Ibid.*, Juz 6, h. 108.

tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Selanjutnya, bilamana Perubahan Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Agama adalah termasuk dalam kategori perubahan hukum. Perubahan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tempat, waktu, dan kondisi sosial. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Ibn Qayyim, sebagai berikut: “Berubahnya hukum seiring dengan perubahan tempat, waktu, dan kondisi sosial.

Sebagai contoh pada Masa Khalifah Al-Rasyidin, Peradilan berlangsung relatif sederhana. Hakim pada saat itu tidak memiliki juru tulis (panitera) dan putusan pengadilan tidak dapat dibukukan (kodifikasi). Wewenang (kompetensi) peradilan para hakim pada Masa Khalifah al-Rasyidin umumnya terbatas pada perkara perdata. Sedangkan yang berhubungan dengan perkara pidana *hudud* dan *ta'zir* dilaksanakan oleh khalifah atau sultan (wali).

Pada Masa Bani Umayyah, putusan pengadilan mulai dicatat agar mudah menjadi rujukan bila terjadi kekeliruan. Syarat-syarat menjadi hakim dan tempat pengadilan mulai ditentukan. Pada Masa Abbasiyah, bentuk dan proses peradilan atau hukum acara peradilan (hukum formal) mulai dikembangkan. Para hakim tidak banyak melakukan ijtihad dan cenderung mengikuti mazhab fiqh yang sudah ada. Pada masa berikutnya, bentuk peradilan semakin berkembang dan bervariasi.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa syariat Islam tidak menentukan kerangka organisasi peradilan. Syariat Islam hanya meletakkan kaidah-kaidah umum, prinsip-prinsip dasar, dan tujuan murni peradilan. Masalah tentang pembatasan wewenang, tempat, atau waktu pengikutsertaan hakim yang lain selain hakim utama dan lain-lain diserahkan kepada kebiasaan dan kebutuhan masyarakat, dengan catatan bahwa semuanya harus memenuhi ketentuan Hukum Islam yang sah. Syariat Islam tidak menetapkan secara baku tentang tingkatan peradilan, seperti tingkat pertama,

banding, atau kasasi. Ia hanya dapat ditetapkan dan diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan sesuai kebutuhan dan rasa keadilan.

Perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan pasca reformasi tentang Peradilan Agama ditandai dengan dua kali perubahan Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Agama. Perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dalam salah satu pasalnya (Pasal 49) menjelaskan bahwa kompetensi absolut Peradilan Agama tidak hanya pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah, melainkan ditambah dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.⁴ Perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan kedua tersebut mengatur tentang keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi kinerja para hakim dalam lingkungan badan Peradilan Agama.

Perluasan kompetensi tersebut senafas dengan teori “*three elements law system*” Friedman, terutama tentang *legal substance*. Friedman menyatakan bahwa *legal substance* merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sebuah sistem.⁵ Substansi juga berarti produk yang dihasilkan, mencakup keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang atau *law in books*. Sepanjang hukum Islam hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat, sepanjang itu pula seharusnya kompetensi yang diemban oleh peradilan agama. Sebab, eksistensi peradilan agama sebagai sebuah *legal structure*, harus berbanding lurus dengan kewenangannya sebagai *legal substance*.

⁴ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Gramata Publishing, Depok, 2010, h. 121-127.

⁵*Legal Substance* menurut Friedman adalah; *the substance is composed of substantive rules about how institutions should be have*. Lawrence Meir Friedman, *American Law: an Introduction, second edition*, W.W. Norton & Company, New York, 1998, h. 14.

Sehingga, jika *legal structure*-nya kuat tetapi *legal substance*-nya tidak kuat, maka ibarat sebuah bangunan hampa yang tidak ada isinya.⁶

Status dan kedudukan Peradilan Agama pada masa dan Pasca reformasi sudah semakin jelas.⁷ Karena Peradilan Agama tidak lagi dibedakan dengan badan peradilan lain yang ada di Indonesia, terutama menyangkut sengketa keperdataan, tidak lagi berhubungan dengan Peradilan Umum. Begitu pula dengan kompetensi yang dimilikinya semakin luas. Selain itu, dari sisi kewenangan sudah semakin luas tidak lagi sebatas nikah, talak, cerai, rujuk, tetapi juga menyangkut persoalan sengketa ekonomi syariah, zakat, infak, serta memutuskan *itsbat riyat hilal*. Sedangkan kemajuan berikutnya, terutama melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memuat tentang keikutsertaan Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi kinerja hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama.

Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat merumuskan bahwa penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta menegakkan keadilan bagi tiap-tiap rakyatnya terutama bagi orang-orang yang beragama Islam.

Seiring pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin pesat, ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah baik yang berbentuk perbankan maupun non-bank, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, gadai syariah dan lain-lain, situasi ini menuntut adanya regulasi yang mengatur secara khusus terhadap jenis, produk, struktur ekonomi syariah, termasuk dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini kemudian mendorong lahirnya beberapa aturan, baik Undang-Undang, Instruksi Presiden, Peraturan Mahkamah Agung, dan sebagainya.

Dalam bidang perbankan, misalnya, lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagai *lex specialis* dari model

⁶*Legal Structure and Legal Substance* merupakan satu kesatuan sistem. *Systema'* yang berarti "Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compound of several parts*). William A. Shrode and Dan Voich, *Organization and Management; Basic System Concepts*, Irwin Book Co., Malaysia, 1974, h. 115.

⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, h. 23-31.

perbankan konvensional. Begitupun dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara eksplisit menjelaskan dalam Pasal 49 bahwa Pengadilan Agama bertugas serta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infak;
- h. sedekah;
- i. ekonomi syariah;

Bidang ekonomi syariah merupakan tambahan/ perluasan kewenangan bagi Peradilan Agama. Adanya pemberian kewenangan kepada Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dengan penjelasan Pasal 49 huruf (i) adalah didasari pertimbangan sesuai perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Sebagaimana dinyatakan Eugien Ehrlich bahwa "... hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat".⁸ Ia juga menyatakan bahwa, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan (*culture pattern*).⁹ Atas dasar ini pula, DPR menambah kewenangan dalam bidang ekonomi syariah kepada Peradilan Agama. Karena itu, perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah adalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi hukum, maka tidak mengherankan jika pada era reformasi ini, Peradilan Agama mengalami perluasan kewenangan, mengingat "... harus ada kesinambungan yang simetris

⁸ Eugen Ehrlich dalam Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 19.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1991, h. 37.

antara perkembangan masyarakat dengan pengaturan hukum, agar tidak ada gap antara persoalan (problem) dengan cara dan tempat penyelesaiannya (*solving*)”.¹⁰ Dalam arti, perkembangan masyarakat yang meniscayakan munculnya permasalahan bisa diselesaikan melalui jalur hukum (legal), tidak dengan cara sendiri (illegal).

Selanjutnya, sebagaimana penjelasan isi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada perbankan syariah saja namun terdapat 11 bidang yang wajib kita ketahui antara lain meliputi; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Sebagai rujukan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah, maka diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memuat empat bagian, Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad, Buku III tentang Zakat dan Hibah, serta Buku IV tentang Akuntansi Syariah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) diberlakukan untuk memperteguh kompetensi Peradilan Agama dalam menangani perkara Ekonomi Syariah, khususnya perbankan syariah. Namun demikian, kenyataannya justifikasi kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengalami kerancuan.

¹⁰ David N. Schiff, “*Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial*”, dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan “*Sociological Approaches to Law*”, terj. Rnc. Widyaningsih dan Kartasapoetra, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, h. 287.

Kontroversi mengenai kompetensi Peradilan Agama mencuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 oleh karena dalam pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai isi akad adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/ atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah, ternyata Peradilan Umum tetap diberi kompetensi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syariah. Dengan demikian, telah terjadi *choice of court (litigation)* yang mengarah pada dualisme kompetensi dalam mengadili oleh dua lembaga litigasi (Pengadilan Agama dengan Peradilan Umum) serta berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Alhasil ini memunculkan perbedaan pendapat di beberapa kalangan pakar hukum.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini,¹¹ salah satu pakar hukum yang kontra terhadap perluasan kompetensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah, menyatakan bahwa hukum Islam bukan merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena itu, Peradilan Agama tidak dapat dipaksakan untuk menyelesaikan perkara yang timbul antara bank syariah dan nasabahnya, melainkan diberlakukan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Adapun Hanawijaya, Direktur Perbankan Syariah Mandiri, berpendapat bahwa Peradilan Agama tidak berwenang sebagai lembaga eksekutorial terhadap putusan Basyarnas, melainkan Peradilan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS).

¹¹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia, Dinamika Pembentukan Hukum*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, h. 226.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Taufik (mantan wakil ketua Mahkamah Agung) dan Abdurrahman (Hakim MA) yang mengemukakan dalam permasalahan benturan perundang-undangan untuk melaksanakan putusan Basyarnas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sekarang sudah tidak bisa diberlakukan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah *lex generalis*, sedangkan Undang-Undang Peradilan Agama itu *lex specialis*. Jadi Pengadilan Agama lah yang lebih berhak dalam melaksanakan putusan Basyarnas.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam bahwa sistem ekonomi syariah itu dibangun di atas pondasi akidah Islam. akidah yang dimaksud adalah haq karena berasal dari Allah yang dibawa kepada umat manusia melalui Muhammad Rasulullah SAW. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim tentunya harus memiliki peraturan yang terpancar dari akidah Islam seperti sistem ekonomi Islam yang memiliki karakter khas dan manusiawi.

Pengadilan Agama merupakan lembaga negara dengan desain khusus yang memenuhi standar lembaga Peradilan Syariah Islam berdasarkan prinsip syariah. Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memberi pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan hukum syariah Islam kepada masyarakat Islam atau masyarakat non-muslim yang tunduk pada hukum syariah Islam. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat Islam pada umumnya.

Dalam hal ini, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/2012 pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, maka tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa oleh dua lembaga litigasi. Amar putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 sebagaimana dalam poin 1.1. dan poin 1.2. menyatakan “Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ini membawa implikasi hukum, yaitu penyelesaian sengketa perbankan syariah,

yang merupakan salah satu bagian dari ekonomi syariah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Secara yuridis Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut memberikan kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama untuk bisa menerima, mengadili dan memutuskan perkara-perkara perbankan syariah sebagai bagian dari cabang muamalat keislaman.

Pemberian kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah memang pada awalnya mendapatkan resistensi (penolakan) dari beberapa pihak. Penolakan terhadap kewenangan baru Pengadilan Agama merupakan hal yang biasa dalam menyusun legislasi di DPR karena mediumnya adalah politik serta kepentingan yang ikut berperan serta. Alasan bahwa Pengadilan Agama tidak ada korelasinya dalam perkara ekonomi syariah sangat sulit diterima mengingat dalam hal ini kelembagaan Pengadilan Agama sebagai wadah dan hukum Islam sebagai muatan isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Selain itu juga, dengan bertumpu pada pendekatan/ paradigma simbiotik yang menyatakan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiolik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama, sebaliknya negara juga memerlukan agama, karena agama membantu negara dalam pembinaan moral, etika dan spiritualitas. Negara Indonesia bukan negara sekuler sebagaimana paradigma sekularistik yang beranggapan bahwa hukum positif yang berlaku adalah hukum yang berasal dari kesepakatan manusia serta tidak ada kaitan dengan hukum agama. Dan bukan pula negara agama sebagaimana paradigma integralistik yang beranggapan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik sekaligus lembaga agama, dengan demikian urusan kenegaraan atau politik merupakan manifestasi dari titah Tuhan dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya menarik sekali dilakukan pengkajian secara sistematis mengenai pertimbangan bahwa Pengadilan Agama lah yang berhak menangani perkara bidang ekonomi syariah sebagaimana

putusan hukum majelis Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/ PUU-X/2012, yang mana penulis mencoba untuk mengungkapkannya dalam tesis yang berjudul “ANALISIS KONTROVERSI PERLUASAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran pakar hukum yang setuju terhadap perluasan bidang ekonomi syariah menjadi kompetensi Peradilan Umum?
2. Bagaimana pemikiran pakar hukum yang setuju terhadap perluasan bidang ekonomi syariah menjadi kompetensi Peradilan Agama?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang kompetensi bidang tersebut?

C. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis, khususnya di lingkungan program studi hukum ekonomi syariah IAIN Raden Intan Lampung, menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “Analisis Kontroversi Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah”, belum ada yang membahasnya. Sehingga tesis ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya secara akademik.

Adapun beberapa penelitian yang mengkaji tentang perluasan kompetensi/ kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah sudah pernah ada, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Dalih Effendy (NPM.200930783), mahasiswa program Magister Hukum Ekonomi Syariah IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2011, dengan judul penelitian “Efektifitas Pelaksanaan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Wewenang Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan tesis ini adalah:

- a. Bagaimana kesiapan Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah?
- b. Mengapa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 khususnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang tidak efektif?
- c. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakefektifan pelaksanaan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama?

Berdasarkan pembahasan dari Saudara Dalih Effendy ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Karang sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama telah mempersiapkan seluruh aparatnya untuk menerima perkara ekonomi syariah. Kesiapan tersebut meliputi bidang administrasi dengan diadakannya instrumen, register, dan lain sebagainya, juga diadakannya pendidikan, pelatihan dan diskusi serta simulasi bagi aparat Pengadilan Agama Tanjung Karang mengenai penanganan perkara di bidang ekonomi syariah.
- b. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah pelaksanaannya dapat dikatakan tidak efektif, karena sudah 5 tahun lebih diundangkan namun belum ada satupun perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang dan lembaga Pengadilan Agama lainnya di kabupaten/ kota se-provinsi Lampung. Padahal Provinsi Lampung menempati peringkat pertama di Indonesia dalam hal pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, yang berarti efektivitas dan intensitas kegiatan ekonomi syariah di provinsi Lampung lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.
- c. Bahwa penyebab tidak efektifnya pelaksanaan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah:

- 1) Tumpang tindihnya aturan hukum dan ketidakjelasan tentang lembaga mana yang berkompeten menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
 - 2) Adanya kecenderungan masyarakat menghindari proses litigasi dan kurangnya sosialisasi pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
 - 3) Serta kecenderungan membela institusi oleh aparat institusi itu sendiri dengan menapikan kewenangan institusi Peradilan Agama.
2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Maria (NPM.1223020005), mahasiswi program Magister Hukum Ekonomi Syariah IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2013, dengan judul penelitian “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Provinsi Lampung Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/ 2012)”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan tesis ini adalah:
- a. Bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Provinsi Lampung tentang sebelum maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/ 2012?
 - b. Bagaimana tanggapan pihak perbankan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah baik sebelum maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/ 2012?

Berdasarkan pembahasan dari Saudari Siti Maria ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Persepsi Hakim Pengadilan Agama terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/ 2012 bahwa wewenang Pengadilan Agama mengacu pada Undang-Undang sebagaimana diatur dalam perubahan Undang-Undang Pengadilan Agama yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Adapun beberapa hakim yang diwawancarai berbeda pandangan (*dissenting opinion*), hakim tersebut beranggapan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 namun apabila pencantuman penyelesaian sengketa yang diatur dalam akad menghendaki penyelesaian dilakukan oleh lembaga peradilan lain selain Peradilan Agama maka penyelesaian harus dilakukan sesuai isi akad karena akad merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

- b. Untuk penyelesaian sengketa terkait dengan ekonomi syariah dan khususnya sengketa perbankan syariah, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/ 2012, pada umumnya dilakukan melalui jalur Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan Basyarnas. Hal ini dikarenakan, masyarakat masih memiliki persepsi bahwa Peradilan Agama hanya menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, dan lainnya yang terkait dengan orang-orang yang beragama Islam (tidak termasuk ekonomi syariah). Namun sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X-2012 yang membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka masyarakat saat ini memiliki kepastian dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur Peradilan Agama.
3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Sardianto (NPM.200730374), mahasiswa program Magister Hukum Ekonomi Syariah IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2011, dengan judul penelitian “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Di Provinsi Lampung Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan tesis ini adalah:
 - a. Bagaimana persepsi hakim-hakim Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang; Pengadilan Agama Kelas I B Metro; dan Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih mengenai penyelesaian

sengketa ekonomi syariah pasca perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006?

- b. Bagaimana kesiapan infrastruktur serta hukum acara bagi hakim Pengadilan Agama yang akan memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah?

Berdasarkan pembahasan dari Saudara Sardianto ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Persepsi hakim-hakim Pengadilan Agama wilayah Tanjung Karang, Metro dan Gunung Sugih mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu: *Pertama*, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i), sebenarnya tidaklah terdapat problem yang berarti secara teknis, tetapi hakim dituntut untuk mengetahui masalah hukum dan menggali kebenarannya untuk selanjutnya diselesaikan dengan menggunakan rujukan-rujukan yang terdapat di dalam literatur-literatur. Problematika berkaitan belum adanya peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah yang bersifat khusus, hal ini menjadikan hakim di Pengadilan Agama harus berjuang keras menggali dan menemukan hukum dari berbagai sumber hukum baik yang ada dalam peraturan perbankan, hukum perjanjian, yurisprudensi ataupun doktrin. *Kedua*, persepsi hakim ditinjau dari pengetahuan, sikap, perilaku dan kesiapan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang kekuasaan absolut ekonomi syariah di Pengadilan Agama, seluruh hakim pada 3 lingkungan peradilan tersebut menyatakan bahwa mengetahui 11 bidang ekonomi syariah dan menyatakan siap untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, para hakim belum sepenuhnya siap secara keilmuan untuk menyelesaikan perkara tersebut. *Ketiga*, masih sangat diperlukan pelatihan dan pendidikan bagi para hakim agar dapat melaksanakan kewenangan baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

b. Selanjutnya langkah strategis mengenai kesiapan infrastruktur serta hukum acara bagi hakim Peradilan Agama yang akan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah dapat dilihat melalui 3 hal yaitu:

- (1) Dari segi aspek hukum materil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai rujukan hakim dalam memutus perkara di bidang ekonomi syariah.
- (2) Dari aspek Sumber Daya Manusia, para hakim Peradilan Agama perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat menangani perkara ekonomi syariah.
- (3) Dari aspek sarana dan prasarana, keberadaan perpustakaan sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja para hakim Peradilan Agama, pengadaan buku-buku penunjang serta pelaksanaan diklat disamping itu juga orientasi dengan praktisi perbankan terutama perbankan syariah dapat pula dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang ekonomi syariah.

Dari beberapa uraian mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan tentang perluasan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, didapat suatu kesimpulan bahwa pembahasan mengenai Analisis Kontroversi Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah belum pernah disinggung sebagaimana penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang akan dilakukan melalui tesis ini adalah berkaitan dengan kontroversi mengenai kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah pada Peradilan Agama dan Peradilan Umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Penelitian tesis ini ditujukan untuk mengkaji secara sistematis mengenai kewenangan/ kompetensi sesungguhnya letak penyelesaian perkara ekonomi syariah berdasarkan perspektif/ pandangan Hukum Islam.

Adapun keunggulan/ keistimewaan dari tesis ini diantaranya adalah:

1. Mampu menganalisis secara mendalam kontroversi perluasan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam perspektif yuridis, historis, politis dan filosofis.
2. Dari kajian yang menggunakan pendekatan yuridis, historis, politis dan filosofis melahirkan konstruksi secara sosiologis model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih memiliki kekuatan hukum tetap dan terwujudnya unifikasi hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai “Analisis Kontroversi Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah” mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih mendalam pemikiran pakar hukum yang setuju terhadap perluasan kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi peradilan umum.
2. Untuk mengetahui lebih mendalam pemikiran pakar hukum yang setuju terhadap perluasan kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi peradilan agama.
3. Untuk mengetahui pula bagaimana perspektif hukum Islam tentang kompetensi bidang tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai “Analisis Kontroversi Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah” diharapkan memiliki manfaat tertentu. Manfaat tersebut sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis, yang diharapkan berguna untuk:

- a. Memberi gambaran tentang perspektif hukum Islam mengenai kompetensi bidang tersebut.
 - b. Diharapkan penulisan tesis tentang analisis kontroversi perluasan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.
 - c. Manfaat lain dari penulisan tesis ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan mengenai perluasan kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada Peradilan Agama.
2. Manfaat secara praktis, yang diharapkan berguna untuk:
- a. Memberi informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syariah tentang cara-cara menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama.
 - b. Memberi pedoman praktis kepada para praktisi hukum khususnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

F. Kerangka Fikir

Beberapa teori, baik teori hukum maupun teori-teori sosial digunakan dalam rangka melakukan analisis atas temuan berupa informasi hasil penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan membahas mengenai pemikiran-pemikiran para pakar hukum yang setuju terhadap perluasan bidang ekonomi syariah menjadi kompetensi Peradilan Umum dan juga pemikiran para pakar hukum yang setuju terhadap perluasan bidang ekonomi syariah menjadi kompetensi Peradilan Agama, serta mengenai pandangan/ perspektif menurut hukum Islam tentang kompetensi bidang tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan/ menambah informasi, pengetahuan dan wawasan bagi kalangan akademik, praktisi hukum serta masyarakat umumnya. Untuk membahas masalah ini, maka perlu didukung teori yang akan digunakan untuk menggambarkan objek penelitian.

Untuk dapat membahas masalah dalam penelitian ini digunakan beberapa teori yang berhubungan langsung yaitu:

1. Teori *Kredo*/ Syahadat

Teori *Kredo*/ Syahadat sebagai *grand theory*, karena subjek hukum menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ialah orang-orang yang beragama Islam sebagaimana dituangkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Makna syahadat di sini ialah merupakan persaksian bahwa bagi seseorang yang mengakui agama Islam sebagai agamanya maka berlaku hukum Islam dalam dirinya/ kehidupannya sebagai tuntunan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dalam hal ini menyelesaikan perkara/ sengketa ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu sendiri bermakna sebagai hukum ekonomi yang berdasarkan syariah yang dilandasi akan pedoman dari Al-Qur'an dan Hadits.

Jadi apabila seseorang menerima Islam sebagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah SWT dan sekaligus taat kepada Rasulullah SAW dan Sunnahnya. Peradilan Agama sebagai wadah penyelesaian perkara dan Hukum Islam sebagai isi pokok pegangan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena hukum Islam merupakan subjek terpenting dalam kajian Islam karena sifatnya yang menyeluruh meliputi semua bidang hidup dan kehidupan muslim. Hukum Islam merupakan cikal bakal dari lahirnya sistem ekonomi syariah yang ditujukan semata-mata demi kemaslahatan manusia khususnya umat Islam dengan tujuan semata-mata mencapai ridha Allah SWT.

Namun pengecualian bagi orang yang beragama non Islam/ badan hukum non syariah diperkenankan menjadi subjek hukum dalam penyelesaian sengketa di Peradilan Agama, asalkan hubungan hukum yang melandasi keperdataan tersebut berdasarkan prinsip syariah.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan sebagai *middle range theory*, karena tujuan semula dibentuknya sebuah lembaga peradilan (litigasi) dalam hal ini Pengadilan Agama ialah untuk dapat menyelesaikan berbagai perkara/ sengketa seperti halnya permasalahan ekonomi syariah guna memberikan keadilan seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang

berkecimpung dalam dunia bisnis atau yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi syariah.

Makna keadilan di sini merupakan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil, terutama mengenai sengketa-sengketa yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi syariah itu sendiri. Salah satu karakteristik dari ekonomi syariah adalah ekonomi berkeadilan, hal ini didasarkan bahwa Islam merekatkan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup dengan semangat persaudaraan antar kaum muslim (ukhuwah Islamiyah) untuk menunjukkan bahwa jaminan hak semua masyarakat dalam mengakses sumber-sumber kekayaan karena sumber-sumber yang ada tidak lain diciptakan untuk seluruh masyarakat, tidak hanya diperuntukkan bagi satu atau beberapa kelompok saja, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 29)¹²

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum sebagai *application theory*, karena kepastian hukum dalam konteks penelitian ini, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap pelaku usaha, serta negara mampu menjamin adanya kepastian hukum tersebut sehingga

¹² *Ibid.*, Juz 1, h. 105.

terselesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-haknya dapat ditegakkan. Namun juga, perlindungan yang sama diharapkan bagi eksistensi produsen yang sangat esensial dalam perekonomian negara. Pada prinsipnya bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbang dengan hak dan kewajiban konsumen. Hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Dan oleh karena itu, diperlukan Perundang-Undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak dengan upaya perwujudan kompetensi absolut bagi suatu lembaga peradilan dalam hal ini Peradilan Agama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yang mempunyai korelasi dengan perluasan wewenang peradilan agama di Indonesia dan upaya kritis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dengan mengkajinya dilihat dari sisi norma hukumnya.

Penelitian ini sering disebut juga penelitian dokumenter untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Penelitian lebih meliputi penelitian asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berlaku, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Titik berat penelitian tertuju pada penelitian dokumenter, yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah:

- a. Perluasan Peradilan Agama Dalam Bidang Ekonomi Syariah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pada Pasal 49.

- b. Opsi Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah yang termasuk dalam perkara ekonomi syariah, Pada Pasal 55 angka (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara perbankan syariah dapat dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/ 2012 pada tanggal 29 Agustus 2013 menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 angka (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi konstitusionalnya, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.

2. Metode Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data primer. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dari arsip-arsip, bahan pustaka, data resmi pada instansi pemerintah, Undang-Undang, makalah yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer,¹³ yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/ 2012 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 55.

- b. Bahan hukum sekunder,¹⁴ yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu: literatur tentang perluasan kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, literatur tentang sistem Peradilan Agama di Indonesia, literatur tentang Hukum Acara Peradilan Agama, dan literatur tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian.¹⁶

4. Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan yuridis (perundang-undangan), pendekatan historis, pendekatan politis dan pendekatan sosiologis.

Pendekatan Undang-Undang (yuridis) digunakan untuk menggambarkan bahwa kajian mengenai sengketa penyelesaian ekonomi syariah mestilah mengacu pada peraturan perundang-undangan berlaku.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 14.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, h. 21.

Dalam hal penggunaan pendekatan historis, dalam tesis ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa interpretasi dalam memaknai Undang-Undang itu terjadi kontroversi sehingga diperlukan adanya unifikasi hukum agar model penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki kepastian pengadilan mana yang berhak.

Adapun penggunaan pendekatan politis bahwa di dalam setiap pembuatan Undang-Undang selalu ada tarik menarik kepentingan. Jadi hasil dari tarik menarik tersebut, sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah yang merupakan produk terbaik dari proses tarik menarik tersebut.

Pendekatan secara sosiologis, memang masyarakat menginginkan kejelasan/ kepastian mengenai pengadilan mana yang berhak menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sehingga masyarakat bisa menyelesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya.

5. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif. Data hasil penelitian yang berupa data hasil studi dokumen (data sekunder) dianalisis dengan metode analisis kualitatif,¹⁷ dengan maksud untuk memaparkan apa yang dianalisis tadi secara sistematis dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi beberapa sub bab tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Pada bab kedua yaitu perkembangan dan kompetensi peradilan agama di Indonesia yang berisi beberapa sub bab tentang pengertian dan sejarah peradilan agama di Indonesia, kompetensi peradilan agama di

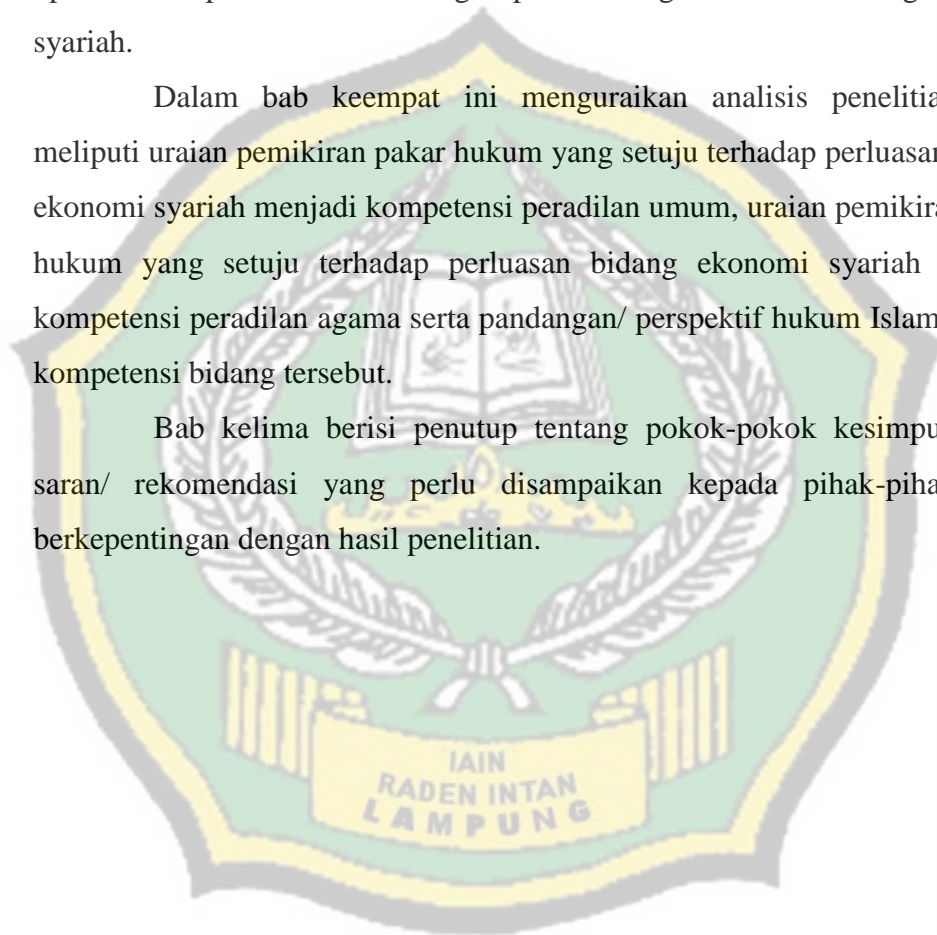
¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 58.

Indonesia, wewenang peradilan agama dalam sejarah Indonesia serta teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia,

Pada bab ketiga yaitu penyajian data tentang pro kontra, latar belakang dan argumen terkait perluasan kewenangan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah yang berisi beberapa sub bab mengenai pro kontra (kontroversi) perluasan kewenangan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah, latar belakang perluasan wewenang peradilan agama serta argumen/ opini terkait perluasan kewenangan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah.

Dalam bab keempat ini menguraikan analisis penelitian yang meliputi uraian pemikiran pakar hukum yang setuju terhadap perluasan bidang ekonomi syariah menjadi kompetensi peradilan umum, uraian pemikiran pakar hukum yang setuju terhadap perluasan bidang ekonomi syariah menjadi kompetensi peradilan agama serta pandangan/ perspektif hukum Islam tentang kompetensi bidang tersebut.

Bab kelima berisi penutup tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran/ rekomendasi yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.



BAB II

PERKEMBANGAN DAN KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

A. Pengertian Dan Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.

¹⁸Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan di suatu lembaga.¹⁹ Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. *Qadha* menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.²⁰

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.

Pengadilan Agama adalah tempat usaha untuk mencari keadilan dan kebenaran yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa yakni melalui suatu majelis hakim atau Mahkamah. Peradilan Agama disebut juga Mahkamah Syariah yang berarti pengadilan atau mahkamah yang tugasnya menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum syaraq. Peradilan Agama hanya khusus berlaku bagi orang yang beragama Islam saja.

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, h. 2.

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 278.

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Op. Cit.*, h. 3.

Memisahkan atau mendamaikan antara dua pihak atau lebih yang berselisih dengan menggunakan hukum Allah ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 48 dan 49, Asy-Syuura ayat 15, serta An-Nisa ayat 65 dan 105:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ (المائدة : ٤٨)

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (QS. Al-Maidah: 48)²¹

وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۝ (المائدة : ٤٩)

²¹ Ahsin Sakho Muhammad, *Mushaf Maqamat*, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2013, Juz 6, h. 115.

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah: 49)²²

فَلِذَلِكَ فَادَّعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
(الشورى: ١٥)

Artinya: Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)". (QS. Asy-Syuura: 15)²³

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: ٦٥)

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka

²² Ibid., Juz 6, h. 116.

²³ Ibid., Juz 25, h. 484.

sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa: 65)²⁴

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (النساء: ١٠٥)

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. An-Nisa: 105)²⁵

2. Sejarah Lembaga Peradilan Agama Di Indonesia

Kehadiran Peradilan Agama di Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan penamaan yang berbeda-beda. Eksistensinya dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia. Sebagaimana *adagium* hukum, “*ibi societas ubi ius*, ada masyarakat ada hukum, ada masyarakat muslim ada hukum Islam”. Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai “medan akhir” dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat muslim, namun sekaligus juga sebagai penjaga eksistensi dan keberlangsungan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Keberadaannya merupakan *conditio sine qua non* dan melekat, serta berbanding lurus dengan eksistensi masyarakat muslim itu sendiri.²⁶

a. Peradilan Agama Pada Masa Kerajaan Islam

Sejarah kompetensi Peradilan Agama di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengumpulan hukum Islam dan dinamika politik hukum di Indonesia. Secara historis, eksistensi hukum Islam di Indonesia sungguh telah berjalan secara paralel dengan kehadiran

²⁴ *Ibid.*, Juz 5, h. 88.

²⁵ *Ibid.*, Juz 5, h. 95.

²⁶ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 2.

Islam di nusantara. Bahkan, sejak awal kehadiran Islam, hukum Islam telah menyatu dalam denyut kehidupan masyarakat Islam nusantara. Premis dasar yang menopang argumen ini adalah bahwa konsepsi hukum Islam merupakan bagian utuh dalam totalitas sistem ajaran Islam yang faktualnya tidak mungkin dapat dipisahkan dari agama Islam itu sendiri.²⁷

Terkait lembaga peradilan, penyelesaian perkara antarwarga yang beragama Islam dilaksanakan melalui lembaga *tahkim* kepada *faqih*, mubalig atau ulama yang dianggap mampu melaksanakan peradilan.²⁸ Tradisi *tahkim* kepada *muhakkam* ini merupakan cikal bakal Peradilan Agama di Indonesia dalam masa awal proses islamisasi di Indonesia. Ketika masyarakat Islam telah mampu mengatur tata kehidupannya sendiri, maka bentuk penyelesaian perkara melalui lembaga tahkim berubah menjadi *ahl al-halli wa al'aqdi* yang dikenal juga sebagai peradilan adat, antara lain di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh, dan sebagainya.²⁹ Terakhir, sistem peradilan berubah menjadi sistem *tauliyah*, terjadi pada saat para raja memeluk agama Islam. Sejak saat itu, jabatan hakim agama diangkat oleh sultan (raja), seperti dijumpai di daerah-daerah *swapraja*/ pemerintahan pribumi. Dalam sistem *swapraja* ini, jabatan keagamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah umum lainnya.

Secara historis, eksistensi peradilan agama di nusantara pertama kali lahir di Jawa-Madura sejak adanya perkara Hukum Islam di antara pemeluk agama Islam, terutama menyangkut perkara dalam bidang perkawinan, perceraian, kewarisan, dan sebagainya. Sejak adanya tuntutan penyelesaian perkara-perkara tersebut, mulai muncul

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, h. 202-203.

²⁸ Abdul Manan, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di lingkungan Peradilan Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 4.

²⁹ C. Van Velehoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, de Brill, Leiden, 1993, h. 170., dikutip dari Zaini Ahmad Noeh, *Kata Pengantar Penerjemah*, dalam Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, Intermasa, Jakarta, 1990, h. 2.

aspirasi agar diselenggarakan lembaga peradilan agama dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan.³⁰

Pada masa pemerintahan Sultan Tahmidillah (1778-1785), saat permulaan penyebaran Islam di Kalimantan Selatan, di kota Martapura yang menjadi ibu kota kerajaan Banjar, sebuah Peradilan Agama dibentuk. Pembentukan lembaga itu mengalami proses penjajakan selama bertahun-tahun melalui pengajaran dan pemberian pemahaman mengenai ajaran Islam dengan penekanan khusus pada masalah hukum Islam. Pemahaman hukum mereka melahirkan perbedaan kepentingan hukum di antara mereka sebagai salah satu awal dari timbulnya kasus-kasus hukum dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan lembaga peradilan di dalam kehidupan yang nyata dengan dibebani kompetensi sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan kasus tersebut menurut kaidah hukum Islam.³¹

b. Peradilan Agama pada Masa Penjajahan (1882-1945)

Masa penjajahan Belanda, seluruh sektor kehidupan bangsa terkontaminasi oleh intervensi kaum kolonial.³² Pada awalnya, pemerintah kolonial Belanda hendak menegakkan hukum yang mereka bawa dari negerinya, namun mereka tidak berhasil memberlakukan hukum itu secara keseluruhan sehingga akhirnya penduduk pribumi yang beragama Islam dibiarkan menjalani hukum yang biasa mereka terapkan.

Hukum Islam yang hadir di tengah-tengah masyarakat nusantara diakui juga oleh *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Organisasi ini bukan sekedar perusahaan dagang, tetapi lebih dari itu. Pemerintah Kerajaan Belanda memberikan kuasa kepada VOC untuk mengadakan kontrak perjanjian dengan kerajaan-kerajaan

³⁰ Abdul Gani Abdullah, *Lembaga Peradilan Agama Sebelum Tahun 1882*, dalam Pembimbing, Tahun IV No. 17, h. 16.

³¹ Antennas Anggraini, *Orang-Orang Terkemuka dalam Sejarah Kalimantan*, Penerbit Karya, tt., h. 29.

³² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 116-117.

pribumi di nusantara, serta memberikan mandat kepada VOC untuk menjalankan administrasi pemerintah Belanda. VOC juga menggunakan hukum yang mereka bawa dari negeri asalnya. Dalam praktiknya, mereka menemukan berbagai kendala karena rakyat pribumi tidak dapat menerima hukum-hukum asing yang tidak dikenal dan bertentangan dengan kesadaran hukum yang hidup di kalangan mereka. Kesadaran hukum yang hidup di tengah masyarakat adalah hukum Islam, terutama di bidang perkawinan, warisan, hibah, dan wakaf. Akhirnya, VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang dimiliki oleh penduduk pribumi berjalan seperti keadaan sebelumnya.³³

Berdasarkan kenyataan itulah muncul teori *receptio in complexu*³⁴ yang diintrodusir oleh Christian Van Den Berg. Ia berpandangan, bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup di kalangan rakyat pribumi yang beragama Islam. Bahkan, ia berpendapat bahwa penerimaan hukum Islam itu bukan hanya sebagian, melainkan secara keseluruhan dalam bentuk kesatuan hukum. Berdasarkan teori tersebut, ia menegaskan bahwa hukum yang berlaku mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Dengan demikian, hukum yang berlaku bagi orang Islam Indonesia adalah hukum Islam. Sementara hukum adat baru dapat berlaku jika dianggap sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan teori itu pula Van Den Berg berpendapat, bahwa Peradilan Agama memang sudah seharusnya ada di Indonesia. Teori ini kemudian mendorong pemerintahan Belanda untuk mendirikan Peradilan Agama pada tahun 1882 yang ditujukan untuk masyarakat yang memeluk agama Islam.

Pemerintah Hindia Belanda memberikan legitimasi yuridis bagi berdirinya Peradilan Agama.³⁵ Tahun 1882 dikeluarkan Firman Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) tanggal 19 Januari 1882 No. 24 Stb 1881-152 yang dalam ketentuan isinya telah melakukan perubahan

³³ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, h. 26.

³⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 10.

³⁵ Departemen Agama, *Sketsa Peradilan Agama*, h. 13.

susunan Peradilan Agama. Keputusan tersebut menetapkan tentang adanya Peradilan Agama (*priesterraad*)³⁶ di setiap pengadilan negeri, walaupun hanya memiliki kompetensi dalam bidang perkawinan dan warisan saja. *Stb* ini merupakan pengakuan terhadap eksistensi Peradilan Agama di Indonesia, sekaligus merupakan tonggak awal lahirnya Peradilan Agama.

Secara yuridis formal, Peradilan Agama sebagai sebuah badan peradilan yang integral dalam sistem ketatanegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tahun 1882. Preseden tersebut didasarkan pada Keputusan Raja Belanda, Willem III, tanggal 13 Januari 1882 No. 24 yang dimuat dalam *Stb* 1882 No. 152. Badan peradilan ini bernama *Priesterraad* yang kemudian lazim dikenal dengan sebutan “Rapat Agama” atau “*Raad Agama*” dan terakhir “Peradilan Agama”. Keputusan raja Belanda ini dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam *Stb* No. 153.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dikatakan, bahwa kelahiran badan Peradilan Agama di Indonesia adalah pada tanggal 1 Agustus 1882.³⁷ Dalam *Stb* 1882 No. 152 tidak disebutkan dengan jelas kompetensi Pengadilan Agama, maka pengadilan itu sendiri yang menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkup kompetensinya. Perkara-perkara tersebut berhubungan dengan masalah pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, perwalian, kewarisan, hibah, *shadaqah*, *baitul mal* dan wakaf.³⁸ Dengan kata lain, yang menjadi kompetensi pengadilan agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf.

Langkah-langkah pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, baik yang mengakomodasi maupun yang menolak Peradilan

³⁶ Cik Hasan Bisri, *Op. Cit.*, h. 96-97.

³⁷ Zuffran Sabrie, *Peradilan Agama di Indonesia, Eksistensi Peradilan Agama, Studi tentang Pelaksanaan Hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam*, h. 12.

³⁸ Noto Susanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1963, h. 7.

Agama dalam sistem hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia semakin memperjelas eksistensi peradilan agama tersebut. Daniel S. Lev mengungkapkan realitas tersebut dalam kata pengantarnya, "... untuk memperjelas mengapa keadaan pengadilan agama di Indonesia, yang tampaknya serba rapuh dan kacau, ternyata tidak saja dapat tegak berdiri, tetapi dalam beberapa hal bahkan tumbuh lebih kuat, sedangkan di negara-negara Islam lain, lembaga-lembaga hukum agama banyak yang dihapuskan dan dipersempit".³⁹ Lev juga berasumsi, bahwa reorganisasi Peradilan Agama melalui *Stb* 1882 No. 152 ini telah melahirkan dua landasan penting yang berkembang secara perlahan-lahan, yaitu tumbuhnya spesialisasi dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dan terbentuknya pengawasan nasional.⁴⁰

Pemerintah kolonial Belanda selanjutnya membentuk sebuah komisi untuk meninjau kembali *Prieseterraad* (Peradilan Agama). Komisi ini menampung saran-saran dari Snouck Hurgronje, antara lain usulan untuk mengganti nama *Priesterraad* dengan *Penghoeloe Gerecht*, dan mendirikan Mahkamah Islam Tinggi sebagai Pengadilan Banding bagi seluruh Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Sebagai imbalannya, komisi meminta agar mencabut kompetensi Pengadilan Agama dalam mengadili perselisihan harta benda dan menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar keluarnya *Ordonantie* Tahun 1931.⁴¹

Snouck Hurgronje mengeluarkan teori baru untuk menyokong kebijakan-kebijakan sepihak yang dikenal dengan istilah *receptie*.⁴² Teori ini menyatakan, bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam baru berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat. Jadi,

³⁹ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Alih Bahasa: H. Zaini Ahmad Noeh, Penerbit Intermedia, Jakarta, 1979, h. 11.

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, h. 14.

⁴² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, h. 12.

hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.⁴³ Perubahan teori yang diusung oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven ini terjadi bersamaan dengan adanya penggantian nama dari *Regeringreglement* (RR) menjadi *Indische Staatsregeling* (IS) pada tahun 1919.

Sehubungan dengan munculnya teori *receptie* ini, kompetensi peradilan agama di Jawa dan Madura, sebagaimana telah diatur oleh *Stb* 1882 No. 152 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya *Stb*. 1937 No. 116 dan No. 610. Masalah kewarisan yang sebelumnya menjadi kompetensi Pengadilan Agama dicabut dan diserahkan menjadi kompetensi pengadilan umum dengan pertimbangan, bahwa hukum waris belum menjadi hukum adat.⁴⁴

Eksistensi teori *receptie* ini mulai dipraktikkan melalui Pasal 134 IS yang menyatakan, bahwa orang pribumi diperkenankan memberlakukan hukum Islam sepanjang hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat. Akibatnya, beberapa kompetensi Peradilan Agama tereleminasi, misalnya penyelesaian perkara waris yang tadinya adalah kompetensi pengadilan agama (*Priesterraad*), kemudian dialihkan menjadi kompetensi pengadilan umum (*Landraad*). Penguatan eksistensi teori *receptie* ini berlanjut, misalnya dengan keluarnya peraturan yang tertuang dalam Pasal 134 (2) IS *Stb* 1929 No. 221 yang menyatakan, bahwa apabila terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam jika hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi. Pengaruh teori ini juga dapat dijumpai dalam *Stb* 1835 No. 58 yang menyatakan, “Apabila terjadi sengketa antara orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta, dan perkara-perkara sejenis yang harus diputus menurut hukum Islam, maka para pemuka agama memberikan keputusan, tetapi gugatan untuk mendapatkan pembayaran yang timbul

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 16.

⁴⁴ A Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gema Meida, Yogyakarta, 2002, h. 155.

dari keputusan pemuka agama itu harus dimajukan kepada pengadilan umum.⁴⁵

Kekuatan *ordonantie* Tanggal 31 Januari Tahun 1931, Stb 1931 No. 153 yang baru berlaku pada tahun 1937, kemudian mengalami perubahan dengan Stb 1937 No. 116, telah mencabut kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara harta benda (waris) dan menyerahkan ke Pengadilan Negeri. Penyerahan kompetensi ini telah menimbulkan kemarahan umat Islam yang menganggapnya sebagai suatu penolakan terhadap kenyataan yang ada dan sudah berlangsung lama. Tokoh di belakang pemerintahan Belanda yang berupaya memindahkan kompetensi tersebut adalah Ter Haar. Ia memberikan argumen, bahwa dalam kenyataannya Islam tidak mendalam pengaruhnya pada peraturan-peraturan kewarisan dalam keluarga di Jawa dan tempat lain di seluruh Indonesia. Secara tegas, mereka menyebutkan bahwa hukum Islam dalam kewarisan sedikit sekali hubungannya dengan rasa keadilan hukum bagi masyarakat. Mereka beranggapan, bahwa hukum Islam dalam kewarisan belum sepenuhnya diterima dalam adat Jawa dan tidak sepatutnya menjadi kompetensi peradilan agama, tetapi harus diserahkan kepada peradilan umum yang akan dapat memutuskan dan menetapkan hukum adat yang serasi. Dalam praktiknya, mereka menghendaki agar daerah Jawa secara etnologis harus menggunakan pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan.⁴⁶

Menurut Hazairin, teori *receptie* yang diciptakan oleh Snouck Hurgronje adalah teori iblis. Disebut demikian karena teori itu telah mempengaruhi umat Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasulullah.⁴⁷ Hazairin mengemukakan pandangannya agar hukum yang diberlakukan di Indonesia adalah hukum Islam, bukan hukum adat. Berlakunya hukum Islam, menurut

14. ⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006*, h.

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, h. 97.

Hazairin harus didasarkan pada penunjukan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana hukum adat yang dasar pemberlakuannya adalah hukum adat itu sendiri yang kemudian didukung oleh peraturan Perundang-Undangan.

Lebih lanjut Hazairin menyatakan, bahwa dalam negara Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu-Budha bagi pemeluk agama Hindu-Budha. Selain itu, Negara Republik Indonesia wajib memberlakukan syariat Islam bagi umat Islam, syari'at Nasrani bagi penganut Nasrani, syariat Hindu-Budha bagi pemeluk Hindu-Budha. Teori yang dikemukakan oleh Hazairin ini dikenal sebagai Teori *Receptie Exit*. Teori ini hendak menyatakan, bahwa teori *receptie* harus keluar dari teori hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila serta bertentangan pula dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Kemudian, Sayuti Thalib memperkenalkan teori *receptio a contrario* sebagai ekstensifikasi dari teori *receptie exit*-nya Hazairin. Teori *receptie a contrario* Sayuti Thalib ini menyatakan, bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agamanya. Dengan demikian, hukum adat hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini sejalan dengan konsep 'urf yang dikenal dalam Islam.⁴⁸

Meskipun Belanda tidak berhasil menghapuskan Peradilan Agama, namun politik kolonial telah berhasil mengerucutkan kompetensi Peradilan Agama dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama, membatasi kompetensi Peradilan Agama pada perkara-perkara keperdataan (*de burgerlijke rechtzaken*). Kemudian

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006*, h. 16.

dipersempit lagi, hanya terbatas pada penerapan hukum kekeluargaan yang dibatasi pula pada persoalan nikah, talak, dan rujuk.

Kedua, mengembangkan peradilan adat. Alasannya, hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yang berbeda dengan hukum Islam. Dengan demikian, diperlukan peradilan tersendiri untuk menerapkan hukum adat, antara lain dengan membentuk *Landraad*.

Ketiga, menjalankan politik unifikasi atas dasar tuntutan kepastian hukum, tuntutan keadilan, dan persamaan perlakuan di beberapa bidang hukum tertentu harus berlaku hukum yang sama bagi setiap orang tanpa membedakan agama, asal-usul, dan sebagainya.⁴⁹

c. Peradilan Agama Pada Masa Kemerdekaan (1945-1989)

Memasuki era Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat pasca Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, produk regulasi di bidang kekuasaan kehakiman diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung RI. Secara kronologis, Baqir Manan⁵⁰ mencatat, bahwa dalam perkembangannya telah juga ditetapkan produk Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Perkembangan produk regulasi bidang kekuasaan kehakiman tersebut secara *gambling* merepresentasikan dinamika pemikiran dan *political will* mengenai eksistensi dan kedudukan Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional. Pada periode kemerdekaan, perkembangan hukum Islam mulai menapaki jalan baru. Peluang untuk

⁴⁹ Baqir Manan, *Kebijakan Mahkamah Agung dalam perkara-perkara Syari'ah setelah Satu Atap*, dalam Ahmad Kamil (ed). Teori akad dan Aspek-aspek Hukum Bisnis dalam ekonomi Syari'ah, 2006, h. 10.

⁵⁰ Baqir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, h. 1.

mengembangkan Hukum Islam di Indonesia semakin besar karena memperoleh dukungan dari struktur pemerintahan, yaitu dengan lahirnya Departemen Agama pada tahun 1946. Pada awalnya, Departemen Agama juga menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan baik di tubuh masyarakat sendiri maupun dari pihak luar terutama karena adanya aksi Belanda yang hendak melanjutkan penjajahannya di bumi nusantara. Oleh sebab itu, tahun 1949, tujuan pendirian Departemen Agama pertama kali dapat dirumuskan.⁵¹ Terlepas dari kenyataan tersebut tak dapat dipungkiri, bahwa terbentuknya Departemen Agama membuka peluang besar bagi berkembangnya hukum Islam pada masa depan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah atas usul Departemen Agama dan disetujui oleh Menteri Kehakiman menetapkan, bahwa Peradilan Agama yang selama ini bernaung di bawah kekuasaan Kementerian Kehakiman diserahkan pada Kementerian Agama berdasarkan Ketetapan Pemerintah No. 5/ SD tanggal 25 Maret 1946. Sejak saat itu, Peradilan Agama menjadi bagian penting dari Departemen Agama.⁵²

Peraturan sementara yang mengatur Peradilan Agama tercantum dalam *Verordening* 8 November 1946 dari *Chief Commanding Officer Aled Military Administration Civil Affair Branch*. Melalui *Verodening* ditetapkan adanya Pengadilan Penghulu yang terdiri atas seorang ahli hukum Islam sebagai ketua dibantu oleh dua orang anggota, serta seorang panitera. Mengenai kompetensi yang dimiliki sama dengan *priesterraad* sebelumnya.⁵³ Sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dasar kompetensi kekuasaan Peradilan Agama masih tetap berlaku sebagaimana sebelum proklamasi kemerdekaan, baik di Jawa, Madura, Kalimantan Selatan, dan daerah lain.

⁵¹ Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1983, h. 35.

⁵² Mubarak, *Memahami Lembaga Peradilan Agama*, "Makalah pada Acara Pemahaman Undang-Undang Pengadilan Agama Departemen Hukum dan HAM RI, tanggal 7 September 2006 di Yogyakarta.

⁵³ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, h. 70.

Pada tahun 1946, dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Segera setelah dikeluarkannya undang-undang ini diambil tindakan dengan jalan memisahkan urusan pendaftaran nikah, talak, dan rujuk dari Pengadilan Agama. Penghulu kepala yang sebelumnya merangkap sebagai Ketua Pengadilan Agama tidak lagi mencampuri urusan pengadilan maka terbentuklah Penghulu kabupaten dengan tugas kepenghuluan di samping penghulu hakim yang dikhususkan menangani Pengadilan Agama dengan mendapat gaji, tingkat, dan kedudukan sebagai Penghulu Kepala. Seluruh biaya tata usaha pengadilan menjadi tanggungan negara, sedangkan pegawai dan panitera dibayar dengan gaji tetap dan ongkos perkara harus disetorkan ke kas negara.⁵⁴

Pada tahun 1948, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat menyetujui untuk disahkannya UU No. 19 Tahun 1948 sesuai dengan dinamika politik hukum tentang kekuasaan kehakiman yang muncul saat itu. Dalam Undang-Undang ini, hanya ditentukan bahwa dalam negara Republik Indonesia terdapat tiga lingkungan peradilan, yaitu: 1) Peradilan Umum, 2) Peradilan Tata Usaha Pemerintahan, dan 3) Peradilan Ketentaraan. Kekuasaan kehakiman dalam peradilan umum dilakukan oleh: 1) Pengadilan Negeri; 2) Pengadilan Tinggi; dan Mahkamah Agung.⁵⁵

Sederhananya, status dan kedudukan peradilan agama dalam UU No. 19 Tahun 1948 tidak diakui sebagai peradilan yang sah di Indonesia. Pada sisi lain, meskipun diundangkannya UU No. 19 Tahun 1948 ini untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung ke arah yang lebih baik sesuai dengan asas kedaulatan bangsa Indonesia. Namun faktualnya, perubahan Undang-Undang tersebut masih bersifat *euro centris*; tetap berkiblat ke Barat (Belanda). Hal itu terlihat dari bentuk peradilan dan perangkat

⁵⁴ Zuffran Sabrie, *Pengadilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, Departemen Agama, RI, Jakarta, 1999, h. 19.

⁵⁵ Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948.

hukum acara dan hukum materiil yang masih menggunakan hukum Belanda.⁵⁶ Tidak diakuiinya status dan kedudukan Peradilan Agama sebagai peradilan yang sah dan mandiri dalam sistem peradilan di Indonesia secara implisit dapat diketahui dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 1948 itu sendiri, sebagaimana selengkapnya berbunyi:⁵⁷

- 1) Dalam Pengadilan Negeri segala putusan ditetapkan oleh seorang hakim, kecuali ditentukan lain.
- 2) Perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang terdiri atas seorang hakim ahli agama Islam sebagai anggota yang diangkat oleh Presiden atas usul menteri agama dengan persetujuan menteri kehakiman.

Produk regulasi bidang kekuasaan kehakiman pasca diundangkannya UU No. 19 Tahun 1948 tentu saja menyisakan pertanyaan, di manakah eksistensi dan kedudukan peradilan agama dalam sistem peradilan nasional? Ketentuan UU No. 19 Tahun 1948 mengenai perkara perdata di antara orang Islam tersebut tampak “tidak lazim” dan seolah telah mengeliminasi peradilan agama dalam sistem peradilan nasional. Bahkan, pemerintah sendiri sesungguhnya tidak yakin jika diundangkannya Undang-Undang ini akan diterima sepenuh hati oleh masyarakat sebab aroma politik hukum Belanda yang diterapkan terhadap Peradilan Agama masih sangat terasa kental.⁵⁸ Otoritas pemberlakuan Undang-Undang ini sepenuhnya didelegasikan kepada menteri kehakiman untuk menetapkan hari/ tanggal mulai berlakunya.⁵⁹ Namun karena secara faktual mendapatkan protes dari kalangan umat Islam Indonesia, maka Undang-Undang ini mati

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Struktur Hukum Modern*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, h. 30.

⁵⁷ Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948.

⁵⁸ Ismail Muhammad Syah, *Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Aceh, Dahulu, Sekarang, dan Nanti dalam Ismail Suny*, Bunga Rampai tentang Aceh, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1980, h. 242-243.

⁵⁹ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948.

sebelum diberlakukan,⁶⁰ lantaran telah dinilai tidak sesuai dengan kesadaran masyarakat muslim Indonesia sebagai entitas yang tidak bisa dipisahkan dari totalitas masyarakat Indonesia.

Kemudian pada tahun 1951, pemerintah menetapkan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951. Undang-Undang Darurat ini dibuat dalam rangka menyusun dan menata kembali kekuasaan kehakiman masa kolonial yang faktualnya sudah tidak sesuai lagi dengan dasar-dasar baru Negara Indonesia merdeka yang bersatu dan berdaulat. Karena susunan kekuasaan kehakiman pada masa kolonial untuk peradilan umum dibedakan ke dalam badan peradilan menurut golongan penduduk maka susunan badan peradilan pun menjadi beraneka ragam. Karena hal ini dipandang sebagai salah satu bentuk politik hukum kolonial yang diskriminatif untuk merendahkan rakyat Indonesia, maka dalam rangka penyusunan badan peradilan untuk seluruh komponen bangsa dan penataan birokrasi peradilan secara menyeluruh diperlukan penyusunan secara sederhana dan terpadu agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.⁶¹

Berdasarkan PP No. 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Provinsi Aceh yang kemudian diubah oleh PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Penamaan Pengadilan Agama adalah Mahkamah Syari'ah/ Pengadilan Agama, sedangkan penamaan untuk peradilan tingkat banding adalah Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syari'ah Provinsi. Berarti dengan PP No. 29 Tahun 1957 yang ada hanyalah pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Provinsi Aceh. Tahun yang sama, Peraturan Pemerintah ini diubah dan diperluas pemberlakuannya dengan PP No. 45 Tahun 1957 mengenai Pembentukan Pengadilan

⁶⁰ Zuffran Sabrie, *Eksistensi Peradilan Agama, Studi tentang Pelaksanaan Hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam*, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2003, h. 21.

⁶¹ Baqir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, h. 1.

Agama/ Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Eksistensi badan peradilan selama masa kekuasaan Orde Lama, faktualnya belum juga mengarah pada bentuk ideal, yakni mandiri dan independen, terbebas dari intervensi kekuatan politik, serta ekstra yudisial lainnya.

Hal ini tercermin jelas dalam produk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 (UU-PKK 1964). Dalam salah satu pasalnya dinyatakan, bahwa "Presiden berhak ikut campur dan intervensi terhadap putusan pengadilan". Bahkan, dalam penjelasannya ditegaskan, bahwa "Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan pembentuk Undang-Undang". Dalam konteks ini, Zaenal Abidin⁶² mencatat, bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Soekarno selaku Presiden terhadap kekuasaan kehakiman.

Cita dan visi pembaharuan tertib hukum baru memasuki secercah harapan setelah penggantian rezim kekuasaan pemerintahan beralih pada rezim orde baru. Dalam perspektif *political will*, kebangkitan orde baru tahun 1966 telah mengusung pelbagai cita-cita luhur untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Penataan yang dilakukan dalam bidang tertib hukum meliputi tertib perundang-undangan dan kekuasaan kehakiman, meskipun faktualnya tidak secepat rumusan cita-cita itu sendiri. Dalam implementasinya, barulah pada tahun 1970 ditetapkan produk Undang-Undang kekuasaan kehakiman versi baru, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (UU-PKK 1970). Melalui Undang-Undang ini, politik hukum mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka dari pengaruh pemerintah kembali dipertegas. Undang-Undang ini juga menegaskan pengaturan kembali masing-masing lingkungan badan peradilan, meskipun penyusunannya terbelang sangat lambat.⁶³

⁶² A. Zainal Abidin, *Rule of Law dan Hak-hak Sosial Manusia dalam Rangka Pembangunan Nasional di Indonesia*, Majalah LPHN, No. 10, 1970, h. 43.

⁶³ Baqir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, h. 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjadi titik awal visi pembaharuan Peradilan Agama. Betapa tidak, ketentuan Undang-Undang ini secara eksplisit menegaskan bahwa peradilan agama menjadi lingkungan tersendiri sebagai bagian utuh sistem peradilan nasional yang melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman. Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa badan peradilan dibedakan ke dalam empat lingkungan kompetensi mengadili perkara tertentu, yakni Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Umum. Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara disebut sebagai pengadilan khusus karena merupakan pengadilan untuk perkara-perkara tertentu, sedangkan Peradilan Umum merupakan peradilan bagi rakyat umumnya, baik mengenai perkara perdata maupun pidana.⁶⁴

Pada fase ini, pemerintah mulai mempertegas eksistensi peradilan agama melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 UUPKK Nomor 14 Tahun 1970 menetapkan, bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan dalam empat lingkungan peradilan, yaitu 1) Peradilan Umum, 2) Peradilan Agama, 3) Peradilan Militer, dan 4) Peradilan Tata Usaha Negara. Seluruh badan peradilan ini disejajarkan posisinya secara hukum dan berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 ini, maka posisi peradilan Agama sama dengan peradilan-peradilan lainnya yang berada dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan demikian, eksistensi peradilan agama mendapat momentum kuat secara konstitusional setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

⁶⁴ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 81

Dalam Undang-Undang ini, Peradilan Agama secara eksplisit diakui sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Meskipun Peradilan Agama telah berdiri sejajar dengan lembaga peradilan lainnya, dalam kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebab pada saat itu intervensi kekuasaan lain, yakni eksekutif terhadap lembaga peradilan sangat kuat sehingga lembaga peradilan sama sekali tidak memiliki kemandirian dan independensi. Dengan demikian, eksistensi dan kedudukan peradilan agama dalam sistem peradilan nasional belum dapat sepenuhnya dikatakan sebagai peradilan yang independen, mandiri dan kukuh. Bahkan, ketika itu tidak ada perubahan sama sekali terkait dengan kompetensi peradilan agama.⁶⁵

Kehendak untuk memperluas kompetensi Peradilan Agama terus diupayakan secara berkesinambungan. Perluasan dimaksud secara historis-yuridis mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meliputi perceraian, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal-usul anak, dan izin menikah.

Pada tahun 1980, dengan keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980, nama yang beragam untuk pengadilan agama berupa Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Provinsi dan nama lainnya, seperti Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi besar di Kalimantan Selatan, disatukan penyebutannya, yakni untuk tingkat pertama disebut Pengadilan Agama dan untuk tingkat banding disebut Pengadilan Tinggi Agama. Dengan demikian, mulai tahun 1980 berdasarkan keputusan Menteri Agama tersebut terdapat uniformitas penyebutan lingkungan peradilan agama, yaitu hanya Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Namun sejarah telah mencatat, bahwa keseragaman penyebutan Pengadilan Agama tersebut barulah dimulai tahun 1980, sedangkan sebelumnya penyebutan Mahkamah

⁶⁵ Wahyu Widiana, *Pasang Surut Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia*, Makalah Kuliah Umum UNISMA Malang, 17 April 2004, h. 4.

Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Provinsi sudah cukup populer di beberapa provinsi di Indonesia. Bahkan sekitar tahun 1800-an, Mahkamah Syari'ah dalam bentuk peradilan serambi sudah terimplementasi dalam institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan syari'ah Islam.

Momen penting perluasan kompetensi peradilan agama terjadi pada tahun 1989 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam hal ini, presiden Republik Indonesia telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama (RUU-PA) kepada DPR melalui amanat Presiden Nomor R-06/PU/XII/1988 tanggal 3 Desember 1988. Kendati demikian, dalam proses pembahasannya, RUU-PA ini telah menimbulkan reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Setelah melalui perdebatan panjang dan polemik yang cukup melelahkan, akhirnya RUU-PA disahkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989.⁶⁶ Dalam lingkup kompetensi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini telah menambahkan kompetensi baru bagi peradilan agama. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan ada enam kompetensi peradilan agama, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, dan *zaqad*. Wewenang tersebut termasuk pula wewenang yang sudah ada seperti perceraian. Wewenang yang diatur dalam Pasal 49 ini, kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi 22 macam.⁶⁷

Pasal 49 ayat (1) berbunyi:

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat,

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disahkan pada tanggal 29 Desember 1989, diundangkan dalam LNRI Tahun 1989 Nomor 49, TLNRI No. 3400.

⁶⁷ Baqir Manan, *Kebijakan Mahkamah Agung dalam Perkara-Perkara Syari'ah Setelah Satu Atap*, dalam Ahmad Kamil (ed), *Teori Akad dan Aspek-Aspek Hukum Bisnis dalam ekonomi Syari'ah*, dihimpun untuk kalangan sendiri, 2006, h. 11.

dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqah”.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sepintas lalu membawa kejelasan dan kejernihan fungsi dan kompetensi Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung mengalami perkembangan dengan adanya pemberian otonomi khusus untuk daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Otonomi khusus, berupa otonomi tambahan atas otonomi yang sudah ada dan penyempurnaan untuk penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Otonomi khusus dimaksud memberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 menjalankan syari’at Islam.

Konsekuensi logis dari penyelenggaraan keistimewaan Aceh yang dipadukan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah sistem peradilan. Peradilan dimaksud berupa Mahkamah Syar’iyah melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2003 maka Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi. Dengan landasan otonomi khusus dimaksud justru menjadikan kewenangan Mahkamah Syar’iyah menjadi lebih luas dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama.

Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan:

“Peradilan Syari’at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun”.

Hukum Islam membedakan istilah syari’at dan syar’iyah. Syari’at adalah realita metafisis yang diketahui melalui Al-Qur’an dan

Hadis.⁶⁸ Syari'ah digunakan dalam dua arti. Pertama dalam arti sempit, yaitu salah satu aspek ajaran Islam, yaitu aspek yang berhubungan dengan hukum. Kedua dalam arti luas mencakup semua aspek ajaran Islam sehingga identik atau sinonim dengan istilah Islam itu sendiri.⁶⁹

Syari'ah adalah aturan hukum yang qath'i (pasti) yang bersumber dari Allah, sedangkan syar'iyah adalah lembaga hukum yang melaksanakan syari'ah sesuai dengan proporsi hukum yang telah ditentukan.⁷⁰ Syar'iyah adalah menjalankan hukum sesuai dengan syari'ah.⁷¹

d. Peradilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini telah membawa perubahan besar bagi kompetensi Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut kompetensi peradilan agama diperluas dengan memasukkan, antara lain ekonomi syariah sebagai salah satu bidang kompetensinya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini menegaskan secara eksplisit ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Perluasan kompetensi Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim. Aspek penting diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat disimak dalam bagian Penjelasan Umum sebagai berikut.⁷²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan Pasal 24 ayat (2), bahwa Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan

⁶⁸ Muhammad Khaled Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan Yudian W. Asmin, Ikhlas, Surabaya, 1995, h. 47.

⁶⁹ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2005, h. 19.

⁷⁰ Firdaus, *Syari'at Islam di Negeri Syari'ah*, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2004, h. 6.

⁷¹ Samsuar, *Zakat dan Pajak dalam Filsafat Islam*, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2005, h. 71.

⁷² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zaqad, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kompetensi lingkungan peradilan agama diperluas sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain mengenai ekonomi syariah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan, “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.

Secara garis besar, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 meliputi tiga hal mendasar, yaitu mengenai kompetensi, pembinaan dan hak opsi.⁷³ Jika pada masa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peradilan agama hanya berwenang memeriksa perkara perdata tertentu di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, waqaf, dan shadaqah (Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989), kini kompetensi tersebut diperluas. Kata perdata pada Pasal 2 dihilangkan sehingga berbunyi, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan penambahan sehingga berbunyi, “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

⁷³ Syamsuhadi Irsyad, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, makalah, 10 Juli 2006, h. 23-24.

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zaqad; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syariah”.

Peradilan agama tidak hanya menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, tetapi juga berwenang menangani permohonan pengangkatan anak, sengketa zaqat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya di antara sesama muslim, serta ekonomi syariah.

Kalimat yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, “bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.

B. Kompetensi Peradilan Agama Di Indonesia

1. Pengertian Mengadili

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Kewenangan mengadili (kompetensi mengadili) dalam ilmu pengetahuan dikenal 2 kekuasaan yaitu:⁷⁴

- a. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pemberian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*/ kompetensi absolut) kepada suatu peradilan yang menanganinya perkara tersebut.
- b. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*/ kompetensi relatif) diantaranya masing-masing pengadilan dalam lingkungan peradilan.

Kewenangan mengadili diatur dalam Pasal 84, 85, dan 86 KUHAP (kompetensi relatif) yaitu:

⁷⁴ http://www.slideshare.net/Ronalto_Tan/13-kewenangan-mengadili

Pengadilan berwenang mengadili suatu perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, Pengadilan negeri daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ditemukan atau ditahan atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu.

Apabila terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum yang berbeda, maka pengadilan itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.

Apabila beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbeda dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Dalam hal keadaan daerah hukum “tidak mengizinkan” untuk mengadili suatu perkara (antara lain tidak aman daerah atau adanya bencana alam) maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala Kejaksaan negeri bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada menteri kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain untuk mengadili perkara dimaksud (Pasal 85 KUHAP).

Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik, maka pengadilan negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya (Pasal 86 KUHAP). Dalam penjelasan tersebut menganut asas personalitas aktif (asas kebangsaan/ *actieve nationaliteitsbeginsel*/ Undang-Undang yang berlaku di suatu negara itu tetap dapat diberlakukan terhadap warganegaranya) dan personalitas pasif (asas perlindungan/ *beschermingsbeginsel*/ bukan didasarkan kepada warganegaranya melainkan kepentingan negara yang dilindungi).

2. Dasar Hukum Mengadili

Keberadaan Peradilan Agama sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dalam penyelenggaraannya memiliki dasar hukum (landasan yuridis). Peradilan

Agama merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, dasar hukum penyelenggaraannya pun tidak terlepas dari sumber Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia antara lain:

a. Dalil Dalam Al-Qur'an

Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam nomokrasi Islam. seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari Al-Qur'an. Cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang keadilan, misalnya dalam Surat An-Nisa ayat 135 dan 58 serta Surat Al-Maidah ayat 8 dan 42, serta Hadits Rasulullah SAW:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا
تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ إِن تَعْدِلُوا ۖ وَإِن تَلُودُوا أَوْ تَعْرِضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا (النِّسَاء: ١٣٥)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa: 135)⁷⁵

Dari ayat tersebut di atas sekurangnya dapat di tarik tiga garis hukum yaitu:

- 1) Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman.
- 2) Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil.

⁷⁵ *Ibid.*, Juz 4, h. 100.

- 3) Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: ٨)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)*⁷⁶

سَمْعُونََ لِكَذِبٍ اكْمَلُونَ لِلشَّحْتِ ۚ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائدة: ٤٢)

Artinya: *Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. Al-Maidah: 42)*⁷⁷

⁷⁶ Ibid., Juz 6, h. 108.

⁷⁷ Ibid., Juz 6, h. 115.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(النِّسَاء: ٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa: 58)⁷⁸

Dalam satu hadits Rasulullah SAW menyatakan:

“Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu, karena mengambil sikap, apabila yang melakukan pencarian orang telah terkemuka di kalangan mereka membiarkannya, sementara jika yang mencuri orang yang lemah (biasa) mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Dan sesungguhnya aku demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad melakukan pencarian, niscaya aku akan potong tangannya.

Ayat di atas menyatakan bahwasannya keadilan hukum itu tidak membedakan orang berdasarkan status sosial yang dimilikinya, baik ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, terpelajar atau orang awam, dan tidak pula perbedaan warna kulit atau perbedaan bangsa dan agama, sesungguhnya dihadapan hukum semuanya sama.

Kemudian adalah sah untuk menghukum antarmanusia dan wajib melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan merujuk kepada sistem Allah SWT. Mengenai Sunnah, Rasulullah SAW memimpin sistem peradilan dan yang menghukum. Walaupun pada masa itu belum dikenal pembagian kekuasaan, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi dalam praktiknya Nabi dibantu oleh para wakilnya yang dianggap cakap dan mampu secara hukum. Dalam pendelegasian

⁷⁸ Ibid., Juz 5, h. 87.

tugas tersebut, Nabi dibantu oleh seorang sekretaris (*katib*), pengelola zakat (*'amil*), dan hakim (*qadhi*).

Hukum dan keadilan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia peradilan.

Dalam studi hukum Islam, peradilan dikenal dengan istilah *Al-Qadha*. Ia merupakan pranata Hukum Islam yang dipergunakan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan. Dikarenakan memiliki hubungan dengan penegakan hukum Allah. Kedudukan peradilan dalam ranah hukum Islam yang direduksi dari Al-Qur'an dan Hadits sesungguhnya sangat kuat. Peradilan menjadi salah satu lembaga hukum yang tidak pernah hilang dalam kehidupan masyarakat muslim. Ia tumbuh dan berkembang dalam berbagai varian kelembagaannya sejak zaman Nabi, para Khalifah Agung, dinasti Umayyah, Abbasiyah, zaman tiga Kerajaan Agung Islam, hingga zaman sekarang. Di mana ada komunitas muslim, maka berlaku di tempat itu. Di mana berlaku hukum Islam, maka peradilan menjadi *sine quanon* yang dibutuhkan. Berbagai norma yang dapat dijadikan salah satu sumber hukum penyelenggaraan peradilan, menjadi titik paut keadilan dan praktik hukum telah menjadi pusat perhatian yang sangat serius di kalangan para *fuqaha*, seperti termaktub dalam risalah Khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Musa Asy'ari seorang hakim di Kuffah.

Dari surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa Asy'ari tersebut terdapat delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar peradilan dunia modern saat ini:

1. *"Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dan sunnah Rasul yang wajib diikuti. Maka, pamilah benar-benar jika ada suatu perkara yang dibentangkan kepadamu dan laksanakanlah jika benar"*.
2. *"Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persamakanlah kedudukan manusia di dalam majlismu, pandanganmu, dan keputusanmu sehingga orang bangsawan tidak*

dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemah pun tidak berputus harapan dari keadilan”.

3. *“Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin (terdakwa)”.*
4. *“Perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa yang dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal”.*
5. *“Barangsiapa mengaku suatu hak dengan bukti-bukti yang belum terkumpul di tangannya maka berikanlah kepada orang itu yang ditentukan. Jika ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup maka selesailah persoalannya. Cara memberikan waktu yang ditentukan itu adalah sebaik-baik penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar”.*
6. *“Tidaklah akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada suatu hari kemudian engkau meninjau kembali kepada kebenaran karena kebenaran itu qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik dari pada terus-menerus di dalam kesesatan”.*
7. *“Kaum muslim adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang-orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah dikenakan hukum jilid (dera) atau orang yang tertuduh dalam kesaksiannya karena kerabat. Hanyalah Allah SWT yang menguasai rahasia hati hamba-hambanya dan melindungi mereka dari hukuman-Nya, kecuali ternyata dengan bukti-bukti yang sah atau sumpah”.*
8. *“Pahamilah dengan benar persolan yang dipaparkan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat di dalam Al-Qur’an atau Sunnah Nabi, kemudian pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara tersebut dan cari pula contoh-contohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik di sisi Allah dan yang terbanyak miripnya kepada yang benar”.*

b. Hadits

Beberapa bukti yang berhubungan dengan peradilan dalam Hadits Rasulullah SAW, antara lain:

- 1) Dari ‘Amr bin al-‘Ash, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila hakim menghukumi (suatu perkara) lalu berijtihad, dan ijtihadnya itu benar, maka ia mempunyai dua pahala. Kemudian apabila berijtihad dan hasil ijtihadnya salah, maka hanya mendapatkan satu pahala (Muttafaqun ‘alaih)”*.⁷⁹
- 2) Ahmad Abu Daud mengisahkan: Ali Ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Wahai Ali, jika dua orang datang kepadamu untuk meminta keadilan bagi keduanya, janganlah kamu memutuskan sesuatu dari orang yang pertama hingga kamu mendengarkan perkataan dari orang kedua agar kamu tahu bagaimana cara memutuskannya (menghakiminya)”*.
- 3) Baihaqi, Daruquthni, dan Thabrani berkata, Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa yang diuji Allah dengan membiarkan seseorang menjadi hakim, maka janganlah dia membiarkan satu pihak yang berselisih itu duduk didekatnya tanpa membawa pihak lainnya untuk duduk didekatnya. Dan dia harus takut kepada Allah atas persidangannya, pandangan terhadap keduanya dan keputusannya pada keduanya. Dia hendaklah lebih berhati-hati agar tidak merendahkan yang satu seolah-olah yang lain lebih tinggi, dia harus berhati-hati agar tidak menghardik yang satu dan tidak kepada yang lain dan dia pun harus berhati-hati terhadap keduanya”*.
- 4) Muslim, Abu Daud dan An-Nasa’i berkata, Ibnu Abbas bersabda: *“Rasulullah SAW. Mengadili dengan sumpah dan para saksi”*.

Hadits-hadits tersebut secara deskriptif menjelaskan tentang kebenaran lembaga peradilan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum

⁷⁹ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, jilid IV, Sulaiman Mar’i, Singapura, 1960, h. 117.

penyelenggaraan peradilan. Dari hadis-hadis diatas dapat ditarik beberapa catatan bahwa:

- a) Menyatakan bahwa seseorang termotivasi menjadi hakim karena pahala.
- b) Menunjukkan tentang sumber peselisihan dan sumber peradilannya. Sebagai contoh, Rasulullah SAW. Mengatakan kepada Ali untuk tidak mengadili siapa pun hingga ia mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah badan peradilan, ada kedua belah pihak duduk bersama dan seorang hakim harus mendengarkan keduanya. Beliau menyatakan bahwa takutlah kepada Allah saat engkau melihat mereka, berbicara kepada mereka pada saat engkau menghukum mereka.
- c) Membuktikan bahwa Rasulullah SAW mengambil sumpah dan saksi-saksi. Hal tersebut dapat digunakan untuk pembuktian berbagai kasus.

c. Pancasila

Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan Peradilan Agama karena merupakan landasan ideal dalam penyelenggaraan Negara Indonesia. Posisi peradilan secara yuridis normatif merupakan salah satu penyelenggara negara di bidang kehakiman. Ia berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Moh. Mahfud MD,⁸⁰ selain dasar hukum normatif, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits, dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Agama juga diperkuat dengan Pancasila. Sila pertama dalam Pancasila dapat dijadikan dasar hukum bagi berlakunya hukum-hukum Agama di Indonesia. Berlakunya hukum agama ini terutama berhubungan dengan hukum privat (*ahwal al-syakhshiyyah*).

⁸⁰ Moh. Mahfud MD, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Jogjakarta, 1993, h. 19-20.

d. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan sebuah ‘lompatan’ sejarah baru bagi Indonesia yang berhasil mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara. Menurut Notonegoro, rumusan Sila Pertama Pancasila mendapatkan tambahan redaksi, “*Bersesuaian dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab*”.

e. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Pra-Amandemen menyatakan bahwa, “*Lembaga dan peraturan yang ada masih terus berlaku selama belum dibuat lembaga dan peraturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar*”. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan Peradilan Agama pasca-Indonesia merdeka telah memiliki dasar hukum penyelenggaraannya. Peradilan Agama berkaitan erat dengan *Staatsblaad* 1882 tentang *Priesterad* (rad agama). Begitupun pada 25 Mei 1760, telah diterbitkan *Compendium Freijer* yang menghimpun materi hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang dijadikan pedoman menyelesaikan sengketa antar orang-orang Islam.

f. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Agama dalam perspektif historis-normatif memiliki jenjang pengakuan dan pengukuhan yang cukup panjang, baik pada masa kolonial Belanda maupun pada masa kemerdekaan. Ia senantiasa bersentuhan dengan berbagai macam kepentingan dan *political will* yang terjadi saat itu. Berikut ini penulis paparkan beberapa fase Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Agama yang dapat dijadikan salah satu dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia, antara lain:

- 1) *Staatsblaad* 1882 Nomor 152 Jo. *Staatsblaad* Nomor 116 dan 610 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura.

- 2) *Staatblaad* 1937 Nomor 638 dan 639 yang mengatur Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
- 3) Pasal 20, 21, 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945.
- 4) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara 1951-9, dan kemudian dikuatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara (LN) 1961-3, Peradilan Agama diakui keberadaan dan perannya.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan.
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, LN 1964-107, dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, LN 1970-74 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama diakui menjadi salah satu empat badan peradilan negara yang sah.
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN 1974-1 tentang Perkawinan, kemudian dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, LN 1975-12. Dalam Undang-Undang tersebut segala jenis perkara di bidang perkawinan, bagi mereka yang beragama Islam, dipercayakan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikannya.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, LN 1977-38 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peradilan Agama diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara perwakafan tanah milik.
- 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN 1985 Nomor 73, Tambahan LN No. 3316, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN 2009 Nomor 3, Tambahan LN Nomor 4958.
- 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN 1989 Nomor 49, Tambahan LN Nomor 3400, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN 2006 Nomor 22, Tambahan LN Nomor 4611.

11) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN 2009 Nomor 157, Tambahan LN Nomor 5076.

12) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN 2009 Nomor 159.

Dengan demikian, dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Agama menjadi kuat karena didukung oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Ia tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perkembangan Peraturan Perundang-Undangan, baik yang berhubungan dengan kompetensi absolut, relatif, maupun hukum materiil dan formal yang berlaku di lingkungan badan Peradilan Agama.

Adapun sumber hukum sengketa ekonomi syariah meliputi sumber hukum formal dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formal yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, serta *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa dan Madura. Kedua aturan hukum acara tersebut diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Selain dua peraturan tersebut, diberlakukan juga *Burgelijke Wetboek Voor Indonesia (BW)* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ke-4, pembuktian yang termuat dalam pasal 1865 sampai dengan pasal 1993.

Sedangkan untuk Sumber Hukum Materiil yang dapat digunakan sebagai landasan dalam memutus Sengketa Ekonomi Syariah antara lain:⁸¹

a. *Nash Al-Qur'an*

Dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan. Syaukani Al Fanjani⁸² menyebutkan, secara eksplisit ada 21 ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 188, 275 dan 279, An-Nisa ayat 5 dan 32, Hud ayat 61 dan 116, Al-Isra ayat 27, An-Nur ayat 33, Al-Jatsiah ayat 13, Ad-Dzariyah ayat 19, An-Najm ayat 31, Al-Hadid ayat 7, Al-Hasyr ayat 7, Al-Jumuah ayat 10, Al-Maarif ayat 24 dan 25, Al-Maun ayat 1, 2 dan 3.

b. *Nash Al-Hadits*

Hadits Rasulullah SAW yang dapat dijadikan rujukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Sahih Buchari dalam *Al-buyu* ada 82 Hadis, *Ijarah* ada 24 Hadis, *As-Salam* ada 10 hadis, *Al-Hawalah* ada 19 hadis, *Al-Wakalah* 17 hadis, *Al-Muzara'ah* 28 hadis dan *Al-Musaqat* 29 hadis.
- 2) Sahih Muslim ada 115 Hadis dalam *Al-Buyu'*.
- 3) Sahih Ibnu Hiban, tentang *Al-Buyu'* ada 141 Hadis, tentang *Al-Ijarah* ada 38 Hadis.
- 4) Sahih Ibn Khuzaimah ada 300 Al-Hadis tentang berbagai hal yang menyangkut ekonomi dan transaksi keuangan.

c. Peraturan Perundang-Undangan seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

⁸¹ Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, makalah disajikan pada Diskusi Panel Fakultas Hukum Universitas YARSI, 14 Maret 2007.

⁸² Muhammad Syaukani Al Fanjani, *Al Wajiz fi al Istishad al Islami*, terjemahan Muzakir A.S. dengan judul *Ekonomi Islam Masa Kini*, Husaini, Bandung, 1989.

- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang BUMN
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Dokumen Perusahaan
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
- 11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- 12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 13) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Zakat
- 14) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
- 15) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- 16) Peraturan BI Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- 17) Peraturan BI Nomor 3/9/PBI/DPM Tahun 2004 Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produk bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah
- 18) Peraturan BI Nomor 3/9/PBI/2003 Tentang Penyisihan Penghapusan
- 19) Aktiva Produktif bagi Bank Syariah
- 20) Surat Edaran BI Nomor 6/9/DPM Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah
- 21) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- 22) Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
- 23) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/53/Kep/Dir/1988 Tanggal 27 Oktober 1988 Tentang Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

- 24) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/48/Kep/Dir/1988 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG Tanggal 27 Oktober 1988 Tentang Sertifikat Deposito
- 25) Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/Kep/Dir Tanggal 23 Juli Tentang Sertifikat Bank Indonesia
- 26) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/49/UPG Tanggal 11 Agustus 1995 Tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*)
- 27) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/5/UKU Tanggal 28 Februari 1991 Tentang Pemberian Garansi Bank.

d. Aqad perjanjian/ kontrak

Menurut Taufiq,⁸³ dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Apakah suatu akad perjanjian sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak, persamaan dan kesetaraan, keadilan, kejujuran dan kebenaran, serta tertulis. Hakim juga harus meneliti, apakah akad perjanjian mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, seperti mengandung unsur riba, *gharar* atau tipu daya, unsur maisir atau spekulatif dan unsur *dhulm* atau ketidakadilan. Jika unsur-unsur ini terdapat dalam akad perjanjian maka hakim dapat menyimpang dari isi akad perjanjian.

CST Kansil⁸⁴ berpendapat, perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan tata susila, maupun berlawanan dengan sikap hati-hati, sebagaimana patutnya dalam

⁸³ Taufik, *Sumber Hukum Ekonomi Syariah*, Makalah yang disampaikan pada Acara Semiloka Syariat, Hotel Grand Alia Jakarta, 20 November 2006, h. 6-7.

⁸⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 254.

pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri atau orang lain. Sanksi untuk perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menetapkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menerbitkan kerugian itu mengganti kerugiannya.

e. Fiqh dan Ushul Fiqh

Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/1/735/18 Februari 1958 Menteri Agama menganjurkan agar memedomani 13 kitab fiqh dalam memutus perkara di lingkungan Peradilan Agama, perlu juga kitab fiqh lain sebagai bahan perbandingan dan pedoman, seperti *Bidayatul Mujtahid* yang ditulis oleh Ibnu Rusy, DR. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, *Al Fiqh Al Islam i wa Adillatuhu* yang ditulis oleh DR. Wahbah Zuhaili, *Fiqhus Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, dan sebagainya.

- f. Fatwa-fatwa DSN 1 s.d 53/ DSN-MUI/IV/2006
- g. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- h. Yurisprudensi
- i. Adat Kebiasaan⁸⁵

Jika masalah-masalah baru yang timbul saat ini tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa tersebut, maka diberikan untuk mengambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Hal-hal yang baik menjadi kebiasaan, berlaku secara umum, serta tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariat biasa disebut *Urf*. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa *urf* semacam ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Imam Syafi'i menggunakan *urf* sebagai sumber hukum atas dasar pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak

⁸⁵ Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia, Dinamika Pembentukan Hukum*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, h. 243.

mempergunakan *urf* sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat.

3. Syarat-syarat Kompetensi Mengadili

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.⁸⁶

Sesuai dengan tugas yang di emban dan kedudukan seorang hakim yang amat mulia itu maka syarat-syarat untuk menjadi hakim cukup berat. Syarat-syarat seseorang diangkat menjadi hakim menurut Islam adalah sebagai berikut:

a. Beragama Islam

Orang yang diangkat sebagai hakim ini hendaklah orang yang beragama Islam sebab semua kasus yang diperiksa adalah melibatkan orang Islam. Tugas peradilan dalam Islam termasuk dalam wilayah orang kafir tidak boleh dilaksanakan selain orang Islam sendiri. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾ (النساء: ١٤١)

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin).

⁸⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 194.

Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa: 141)⁸⁷

Dalam hal ini mazhab Hanafi berpendapat lebih rinci, yakni membolehkan mengangkat hakim nonmuslim untuk memutus perkara orang nonmuslim, karena orang yang dipandang cakap untuk menjadi saksi harus pula cakap menjadi hakim. Tetapi, tidak pula boleh seorang kafir *dzimmi* memutus perkara orang muslim karena kafir *dzimmi* tidak boleh menjadi saksi bagi orang muslim.⁸⁸

Abdul Al-Autwah tidak setuju dengan pendapat yang membenarkan pengangkatan hakim yang bukan orang Islam untuk mengadili orang-orang Islam. Autwah mengemukakan bahwa mengangkat hakim non muslim hanya dalam keadaan darurat saja.⁸⁹ Oleh karena masalah peradilan merupakan hal yang sangat penting dan menentukan, karena melalui lembaga peradilan hukum syara' dapat ditegakkan. Maka syarat hakim dalam lembaga peradilan Islam hendaknya beragama Islam.

b. Laki-laki

Menurut Jumhur Ulama di kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, laki-laki merupakan syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim, tidak sah wanita diangkat sebagai hakim. Apabila ada pihak yang mengangkat wanita sebagai hakim, maka putusan yang dijatuhkan itu tidak sah.⁹⁰

⁸⁷ *Ibid.*, Juz 5, h. 101.

⁸⁸ Abdur Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1986, h. 19.

⁸⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 23.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 24.

Namun, Hanafi membolehkan wanita menjadi hakim dalam perkara *Hudud* dan *qishash* karena kedua hal tersebut kesaksiannya tidak dapat diterima.

Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا :

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa: 34)⁹¹

Dan kemudian, dalam sebuah Hadits Rasulullah juga bersabda:

Artinya” “Suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan tidak akan berbahagia”. (HR. Bukhari)

⁹¹ Ibid., Juz 5, h. 84.

c. Baligh dan Berakal

Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. Hakim harus orang yang cerdas, bijaksana, mampu memperoleh penjelasan dan menanggapi sesuatu yang muskil. Hukum Islam tidak menetapkan dengan pasti berapa umur minimal seorang dapat diangkat sebagai hakim. Islam hanya menentukan baligh sebagai syarat minimum untuk diangkat sebagai hakim. Dengan demikian anak-anak tidak dibenarkan menjadi hakim karena mereka belum dapat dipertanggung jawabkan pekerjaannya. Pada umumnya para ahli hukum Islam batas minimal untuk diangkat sebagai hakim adalah berusia minimal 25 tahun.

Menurut Imam Al-Mawardi menambahkan, hakim harus memiliki tingkat kecerdasan akal yang lebih dari rata-rata, tidak pelupa, dan pola pikirnya bagus yang pandai menemukan titik terang dari sebuah kemusykilan.⁹²

Pentingnya akal bagi hakim ini berkaitan dengan tugas hakim untuk menggali hukum (ijtihad), sebagaimana Hadits Rasulullah SAW Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi:

وما بعث النبي معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا، قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟) قال: أقضي بكتاب الله تعالى، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله

Artinya: “Ketika Nabi mengutus Sahabat Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai hakim Nabi bertanya: Bagaimana cara kamu menghukumi suatu masalah hukum? Muadz menjawab: Saya akan putuskan dengan Quran. Nabi bertanya: Apabila tidak kamu temukan dalam Quran? Muadz menjawab: Dengan sunnah Rasulullah. Nabi

⁹² Syafi’I Saghir, *Nihayatul Muhtaj*, h. 238.

bertanya: Kalau tidak kamu temukan? Muadz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan tidak akan melihat ke lainnya. Muadz berkata: Lalu Nabi memukul dadaku dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan pada utusannya Rasulullah karena Nabi menyukai sikap Muadz. (HR. Abu Dawud)⁹³

Dalam berijtihad inilah sangat dibutuhkan peranan dari kecerdasan akal seorang hakim. Bahkan akal ini menjadi perhatian penting oleh para ulama'. Seperti Syafi'i sangat tegas menyatakan bahwa hakim tidak boleh disibukkan dengan suatu urusan yang menyebabkan akalnya terganggu misalnya berdagang. Atau keadaan yang menyebabkan akal tidak stabil misalnya marah.⁹⁴

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضَبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو بَكْرَةَ اسْمُهُ نَفِيعٌ

Artinya: “Seorang hakim tak boleh memutuskan hukum di antara dua orang ketika dalam keadaan marah. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih, Abu Bakrah bernama Nufai”. (HR. At-Tirmizi No. 1254)⁹⁵

d. Adil

Seorang hakim harus terpelihara dari perbuatan-perbuatan haram, di percaya kejujurannya, baik di waktu marah atau tenang, dan perkataannya harus benar.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafi'i. Golongan Hanafi berpendapat bahwa putusan hakim yang

⁹³ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, vol. III, h.330 Hadits No. 3594.

⁹⁴ Al-Syafi'i, *Al-Um*, Juz VI, h. 215.

⁹⁵ At-Tirmizi, *Al-Jami'u*, h. 396.

fasik adalah sah bila sesuai dengan syara' dan Undang-Undang. Sedang Syafi'i tidak membolehkan mengangkat orang fasik menjadi hakim karena seorang fasik tidak diterima sebagai saksi.

Tidak boleh mengangkat hakim dari orang yang fasik. Jika yang diangkat adalah orang yang fasik, maka tidak sah kedudukannya sebagai hakim, dan tidak bisa dilaksanakan putusannya serta tidak bisa diterima perkataannya,⁹⁶ sekalipun orang fasik itu diangkat secara resmi oleh kepala negara, atau wakilnya, atau yang berwenang.

Seandainya sudah terlanjur mengangkat orang yang fasik dan atau bodoh sebagai hakim, maka putusannya tetap harus dilaksanakan tapi dengan alasan darurat.⁹⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ
سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ
عُمَرَ اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ أَوْ تُعَافِنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَمَا
تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَالْحَرِيُّ أَنْ يَنْقَلِبَ
مِنْهُ كَفَافًا فَمَا أَرْجُو بَعْدَ ذَلِكَ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ
عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ الْمُعْتَمِرُ هَذَا هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ
بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ

Artinya: “Barangsiapa menjadi hakim lalu menghukumi dengan adil, niscaya ia akan dijauhkan dari kejelekan (tidak mendapat pahala & juga siksa). Lalu apa yang aku harapkan setelah itu. Hadits ini memiliki kisah & dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Hadits Ibnu Umar adl hadits gharib & menurutku sanadnya tak bersambung. Abdul Malik, di mana Al

⁹⁶ Abi al-Dam, *Adabil Qada'*, h. 33.

⁹⁷ *Ibid.*, h. 33.

Mu'tamir meriwayatkan hadits darinya, bernama Abdul Malik bin Abu Jamilah (HR. At-Tirmizi No. 1243)⁹⁸

e. Mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya

Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum agar memperoleh jalan untuk perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan menurut madzhab Syafi'i hakim harus mujtahid mutlak yaitu mengetahui tentang Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, pendapat ulama', dan bahasa arab.⁹⁹ Dengan pengetahuannya itu dia dapat melakukan istimbath hukum atau menggali dan menemukan hukum dari sumbernya. Hal ini disyaratkan karena hakim tidak boleh berijtihad dengan semata-mata berangkat dari menurut dirinya sendiri. Dengan kata lain hakim harus menggunakan dasar hukum yang berlaku.

f. Sempurna Panca Indra (mendengar, melihat, dan tidak bisu)

Orang yang akan di angkat sebagai kadi hendaklah orang yang sempurna pancaindra nya, terutama ia dapat mendengar dan tidak bisu¹⁰⁰. Orang bisu tidak boleh diangkat menjadi hakim karena orang bisu tidak bisa menyebut putusan yang dijatuhkannya. Demikian pula orang tuli karena tidak dapat mendengar keterangan para pihak, sedang orang buta tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara. Syafi'i membolehkan orang buta, tetapi mengakui lebih utama orang yang tegap dan sehat.¹⁰¹

Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa seorang hakim hendaknya orang yang bisa melihat dan mendengar.¹⁰² Dengan penglihatan dan pendengaran yang sempurna itu, ia dapat menetapkan hak-hak manusia dengan baik, ia dapat juga membedakan antara pihak yang mengakui dan pihak yang mengingkari, sehingga ia dapat

⁹⁸ At-Tirmizi, Al-Jami'u, h. 392.

⁹⁹ Al-Farra', Abi Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, h. 61.

¹⁰⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Kencana*, Jakarta, 2010, h. 27.

¹⁰¹ Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT Ma'arif, Yogyakarta, 1994, h. 39.

¹⁰² Abdul Manan, *Op. Cit.*, h. 27-28.

membedakan pihak yang benar dengan pihak yang salah dan orang yang berbuat benar dengan orang yang berbuat salah.

g. Berpengetahuan Luas

Para ahli hukum dikalangan mazhab Syafi'i, Hambali dan sebagian dikalangan mazhab Hanafi, mensyaratkan dalam pengangkatan hakim hendaknya berpengetahuan luas dalam bidang hukum Islam dan kepandaianya itu harus bertaraf mujtahid. Sehubungan dengan hal ini, maka tidak sah pengangkatan hakim itu dari kalangan orang jahil dan mukalid.

Menurut Imam Al-Mawardi, orang yang dianggap mengetahui Hukum Islam secara luas adalah:

- 1) Menguasai ilmu tentang kitab Allah SWT dalam kadar yang dengannya ia dapat mengetahui kandungan hukum-hukum dalam Al-Qur'an.
- 2) Memiliki pengetahuan ilmu tentang Sunnah Rasulullah SAW yang stabil.
- 3) Menguasai pengetahuan tentang takwil dikalangan salaf.
- 4) Memiliki pengetahuan tentang Qiyas yang tidak dibicarakan di dalam Nash.

Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi pada seseorang, maka ia tidak sah diangkat sebagai hakim untuk memutuskan suatu perkara.

Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Maliki tidak mensyaratkan pengangkatan hakim harus orang yang sudah mujtahid. Ketentuan ini adalah sama sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Lain halnya para ahli hukum mazhab Hanafi dalam hal pengangkatan hakim, persyaratan keahlian sampai ke derajat ijtihad itu merupakan sebagian keutamaan pengangkatannya saja, bukan keharusan yang mutlak. Dan dikalangan mazhab Syafi'i mengatakan

bahwa pengangkatan hakim yang tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap hanya dibolehkan apabila dalam keadaan darurat saja.¹⁰³

h. Bukan Budak (Merdeka)

Para pakar hukum Islam dalam berbagai mazhab sepakat bahwa pengangkatan hakim tidak diperbolehkan dari kalangan budak secara mutlak. Hal ini disebabkan karena seorang hamba dianggap tidak mampu untuk memiliki kemampuan diri sendiri. Juga karena statusnya sebagai budak, maka ia tidak dapat memberikan kesaksian dalam berbagai kasus, oleh karenanya ia tidak dapat dijadikan sebagai hakim. Jika ia sudah merdeka, ia boleh saja diangkat sebagai hakim, meskipun ia tetap menanggung wala' (keterkaitan dengan bekas tuannya).¹⁰⁴

Kemudian menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, untuk dapat diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Beragama Islam

Pendapat yang mengatakan orang kafir tidak boleh diangkat sebagai kadi adalah pendapat kebanyakan para ahli hukum Islam. Hal ini didasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرِهِمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْذِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا :

¹⁰³ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 29-30

¹⁰⁴ *Ibid.*,

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa: 141)¹⁰⁵

- 3) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 4) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- 5) Bukan mantan organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk Organisasi Massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G.30 S/PKI, atau organisasi terlarang yang lain.
- 6) Pegawai Negeri
- 7) Sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
- 8) Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun
- 9) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.¹⁰⁶

Keseluruhan persyaratan itu menunjukkan suatu perpaduan antara produk pemikiran fuqaha dengan ketentuan yang berlaku secara umum bagi hakim pada pengadilan tingkat pertama. Secara umum persyaratan hakim pada semua badan peradilan adalah sama. Syarat kedua dan ketujuh hanya berlaku bagi calon hakim pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yang erat hubungannya dengan produk pemikiran fuqaha. Hal itu konsisten dengan kekhususan badan peradilan itu di Indonesia, yang berwenang mengadili perkara perdata tertentu menurut hukum Islam di kalangan orang-orang yang beragama Islam.

Seluruh persyaratan hakim merupakan suatu kesatuan yang bersifat kumulatif. Namun demikian, ada syarat-syarat yang bersifat

¹⁰⁵ *Ibid.*, Juz 5, h. 101..

¹⁰⁶ Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama*, Al-hikmah, Jakarta, 1995, cet. ke-4, h. 248.

konkret dan ada pula syarat-syarat yang bersifat abstrak. Syarat-syarat yang bersifat konkret yaitu kewarganegaraan, agama yang dipeluk, bukan bekas anggota organisasi terlarang, pegawai negeri, bidang keserjanaan dan umur. Ia dapat diketahui atau dibuktikan dengan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan syarat-syarat lainnya bersifat abstrak, yang sulit untuk diketahui dan diukur secara sederhana. Namun, ia merupakan persyaratan yang melekat pada setiap hakim, sehingga sosok hakim yang ideal itu ditentukan oleh persyaratan yang abstrak itu. Berkenaan dengan hal itu, maka penelusuran terhadap persyaratan yang abstrak itu membutuhkan suatu pendekatan tertentu dengan cara yang lebih rumit dan spesifik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persyaratan menjadi hakim, baik dalam kitab-kitab fiqh maupun dalam peraturan perundangan sangat ketat mengingat implikasi putusan hakim sangat menyentuh kepada rasa keadilan masyarakat.

Adapun tugas pokok pejabat teknis pengadilan agama antara lain:¹⁰⁷

a. Tugas Pokok Ketua

- 1) Memimpin jalannya sidang-sidang pengadilan dan mengawasi pelaksanaan tugas yang ada di wilayah hukumnya.
- 2) Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan umum.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran dan barang milik negara.
- 4) Melakukan pembagian tugas pejabat-pejabat di bawahnya dan mendelegasikan sebagian wewenangnya.
- 5) Menilai prestasi kerja bawahannya.
- 6) Melakukan koordinasi dengan wakil ketua, panitera/ sekretaris dan instansi eksternal.
- 7) Menyampaikan usul/ saran dan laporan secara hierarki.

¹⁰⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, h. 53-59.


- 8) Merencanakan dan melaksanakan rapat-rapat koordinasi secara berkala.
- 9) Menyelenggarakan pembinaan mental dan disiplin pegawai.
- 10) Menunjuk salah seorang hakim sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kehumasan.
- 11) Melakukan tugas pengawasan atas pekerjaan penasihat hukum yang dikoordinasikan dengan pengadilan negeri setempat, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada ketua pengadilan tinggi/ agama, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dan HAM.

b. Tugas Pokok Wakil Ketua

- 1) Melaksanakan kebijakan umum yang dibuat oleh pimpinan pengadilan.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengadilan.
- 3) Memimpin jalannya sidang-sidang peradilan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi peradilan sesuai dengan pola Bindalmin, sekaligus sebagai koordinator tindak lanjut hasil pengawasan.
- 5) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran dan barang milik negara.
- 6) Memimpin rapat-rapat Baperjakat.
- 7) Menyampaikan usul/ saran dan laporan kepada ketua pengadilan.
- 8) Mewakili ketua pengadilan ketika ketua berhalangan.
- 9) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan ketua dan panitera/ sekretaris pengadilan.

c. Tugas Pokok Hakim

- 1) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara (melakukan persidangan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 
- a) Mengkonstantir, artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa/ fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkaranya dan berita acara persidangan.
 - b) Mengkualifisir peristiwa/ fakta yang telah terbukti, yakni menilai peristiwa termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantiring untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
 - c) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan (*dictum*).
- 2) Memimpin, membimbing dan memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi terhadap pembuatan berita acara persidangan.
 - 3) Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya, bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan berdasarkan BAP (Berita Acara Persidangan).
 - 4) Meminutir berkas perkara. *Minutering* atau minutasi ialah suatu tindakan yang semua dokumen menjadi resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan. Minutasi dilakukan secara rutin sejalan dengan proses perkara. Minutasi akhir dilakukan setelah perkara diputus selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
 - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah ketua pengadilan, di antaranya ialah sebagai berikut:
 - a) Sebagai rohaniawan sumpah jabatan.
 - b) Memberikan penyuluhan hukum.
 - c) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.

- 6) Melakukan pengawasan terhadap bidang perkara permohonan dan gugatan.

d. Tugas Pokok Panitera/ Sekretaris

1) Tugas Sebagai Panitera

- a) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, serta membuat penetapan/ putusan majelis.
- b) Menyusun berita acara persidangan.
- c) Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan.
- d) Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan.
- e) Bertanggung jawab mengurus berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- f) Memberitahukan putusan *verstek* dan putusan di luar hadir.
- g) Melegalisasi surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.

2) Tugas Sebagai Sekretaris

- a) Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan pengadilan.
- b) Menyusun program kerja tahunan.
- c) Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan anggaran dan barang milik negara.
- d) Menyiapkan rapat-rapat Baperjakat.

e. Tugas Pokok Wakil Panitera

- 1) Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.
- 2) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- 3) Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
- 4) Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti, dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik, dan lain-lain.

f. Tugas Pokok Panitera Muda Gugatan

Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.

g. Tugas Pokok Panitera Muda Permohonan

Melaksanakan tugas sebagaimana panitera muda gugatan dalam bidang perkara permohonan. Yang masuk dalam perkara permohonan ialah permohonan pembagian warisan di luar sengketa, permohonan legalisasi akta ahli waris di bawah tangan, dan lain-lain.

h. Tugas Pokok Panitera Muda Hukum

Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab, rukyat, sumpah jabatan maupun PNS, penelitian, dan lain-lain, serta melaporkannya kepada ketua pengadilan agama.

i. Tugas Pokok Panitera Pengganti

1) Membantu hakim dalam hal membuat penetapan hal sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya dan mengetik putusan/ penetapan sidang.

2) Melaporkan kepada panitera muda gugatan/ permohonan dan melaporkan kepada meja dua untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya penundaan sidang, serta alasan-alasannya, amar putusan sela (bila ada), perkara yang sudah putus beserta amar putusannya, dan kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut.

j. Tugas Pokok Juru Sita/ Juru Sita Pengganti

1) Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

2) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah.

- 3) Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.

4. Kompetensi Mengadili

Adapun Kompetensi Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰⁸ Yang dimaksud kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman. Sedangkan yang dimaksud dengan perkara-perkara tertentu adalah perkara-perkara yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Sedangkan Pengadilan Agama (PA) adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama.¹⁰⁹ Hal itu menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah satuan (unit) penyelenggara Peradilan Agama. Adapun satuan penyelenggara peradilan pada tingkat kedua (banding) adalah Pengadilan Tinggi Agama (PTA), sedangkan pengadilan pada tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung (MA). Dengan kata lain, bahwa pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹¹⁰

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum termasuk peradilan khusus di bawahnya, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.¹¹¹ Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan tersebut memiliki cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*) itu, ditentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan Undang-Undang kepadanya.

¹⁰⁸ Dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

¹⁰⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi:

- a. Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
- b. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Berkenaan dengan hal itu, terdapat atribusi cakupan dan batasan kekuasaan Peradilan Agama. Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang berkedudukan di kota atau kabupaten dan memiliki kewenangan hukum untuk mengadili perkara yang ada di wilayah kota atau kabupaten dimana pengadilan itu berada. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama adalah pengadilan yang berkedudukan di wilayah ibu kota propinsi yang memiliki kewenangan sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi pengadilan agama-pengadilan agama yang berada di wilayah propinsi tersebut untuk memeriksa perkara banding dari pengadilan agama yang ada di bawahnya.

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya selalu berpegang pada asas-asas yang telah ditentukan. Asas-asas umum Peradilan Agama tersebut antara lain meliputi:

- a. Asas Bebas Merdeka

Mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, *direktiva* atau rekomendasi yang datang dari pihak *ekstra yudisial*, kecuali dalam hal yang diizinkan Undang-Undang.

- b. Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan

ditetapkan dengan Undang-Undang, dan peradilan negara menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.¹¹²

c. Asas Ketuhanan

Peradilan Agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum Agama Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat “*Basmalah*” yang diikuti dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹³

d. Asas Fleksibilitas atau *Speedy Administration of Justice*

Pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹¹⁴ Sederhana yang dimaksud adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dalam mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan, yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Biaya ringan yang dimaksud harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara, sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan.

e. Asas Nonekstra Yudisial

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD RI Tahun 1945, sehingga setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana.¹¹⁵

¹¹² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹³ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹⁵ Pasal 3 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

f. Asas Legalitas

Asas legalitas dapat dimaknai sebagai “hak perlindungan hukum” dan sekaligus sebagai “hak persamaan hukum”. Untuk itu, semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasarkan pada hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasarkan pada hukum. Tidak boleh menurut atau berdasarkan pada selera hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.

g. Asas *Legitima Persona Standi in Yudicio*

Asas *legitima persona standi in yudicio* ialah semua orang yang terkait langsung dalam perkara yang diajukan di muka persidangan harus masuk atau dimasukkan sebagai pihak-pihak dalam perkara, apakah pihak-pihak itu sebagai penggugat atau pihak-pihak itu sebagai tergugat. Adapun pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai pihak adalah diantaranya dibatasi oleh umur minimal. Menurut BW Pasal 29, batasan dewasa untuk laki-laki 18 tahun dan 15 tahun untuk perempuan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batasan dewasa untuk laki-laki adalah 19 tahun dan 16 tahun untuk perempuan atau kurang dari umur dimaksud, tetapi sudah menikah.

h. Asas *Ultra Pertium Partem*

Asas *Ultra Pertium Partem* ialah hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau hakim mengabulkan lebih dari yang dituntut. Hal ini berdasarkan pada Pasal 178 ayat (2 dan 3) HIR *jo.* Pasal 189 ayat (2 dan 3) RBg.

i. Asas *Audi et Alteram Partem*

Asas *Audi et Alteram Partem* ialah hakim wajib menyamakan kedudukan para pihak yang berperkara di muka persidangan. Dalam arti pengadilan dalam mengadili para pihak harus ada unsur-unsur: kesamaan derajat, kesamaan hak di persidangan, dan para pihak mempunyai kedudukan yang sama di muka persidangan. Hal ini

berdasar pada Pasal 132a dan pasal 121 ayat (2) HIR *jo.* Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 157 RBg. *jo.* Pasal 47 Rv.

j. *Asas Unus Testis Nulus Testis*

Asas Unus Testis Nulus Testis ialah bahwa seorang saksi tanpa ada alat bukti lain dianggap belum mencapai batas minimal pembuktian. Agar pembuktian mencapai nilai batas minimal, pembuktian harus ada alat bukti lain. Hal ini berdasarkan pada Pasal 169 HIR *jo.* Pasal 106 RBg. *jo.* Pasal 1905 BW.

k. *Asas Actor Squitur Forum Rei*

Asas Actor Squitur Forum Rei ialah pengadilan berwenang memeriksa gugatan hak tergugat bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (3) HIR *jo.* Pasal 142 ayat (5) RBg., kecuali Undang-Undang menentukan lain sebagaimana terhadap perkara perceraian yang berlaku di muka pengadilan.

l. *Asas Actor Squitur Forum Rei Sitai*

Asas Actor Squitur Forum Rei Sitai ialah gugatan diajukan di pengadilan di mana benda tidak bergerak itu berada atau terletak. Hal ini sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR *jo.* Pasal 142 ayat (5) RBg.

Selanjutnya dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terdapat 9 bidang hukum yang termasuk ke dalam kewenangan/ kompetensi mengadili di lingkungan Pengadilan Agama yaitu:

- a. Hukum perkawinan
- b. Hukum waris
- c. Hukum wasiat
- d. Hukum hibah
- e. Hukum wakaf
- f. Hukum zakat
- g. Hukum infaq
- h. Hukum shadaqah
- i. Hukum ekonomi syariah

Bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terdapat 3 (tiga) tambahan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama, yaitu zakat, infaq dan ekonomi syariah.

Hal-hal baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 antara lain:

- a. Perkara perdata tertentu diubah menjadi perkara tertentu. Penghapusan kata “perdata” disini dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama.¹¹⁶
- b. Pilihan hukum dihapus.
- c. Sengketa hak milik bagi orang Islam diselesaikan di Peradilan Agama.
- d. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ditetapkan di Peradilan Agama.
- e. Penetapan ahli waris secara voluntair (ex. Psl. 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).
- f. Pemisahan jabatan sekretaris dan panitera di Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama.

Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. bank syariah
- b. lembaga keuangan mikro syari’ah;
- c. asuransi syari’ah;
- d. reasuransi syari’ah;
- e. reksa dana syari’ah;
- f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. sekuritas syari’ah;
- h. pembiayaan syari’ah;
- i. pegadaian syari’ah;

¹¹⁶ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* Kencana, Jakarta, 2008, h. 343.

- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. bisnis syari'ah.

Istilah syariah dalam konteks kajian hukum Islam lebih menggambarkan kumpulan norma-norma hukum yang merupakan hasil dari proses *tasyri'*.¹¹⁷ Dilihat dari sudut kebahasaan, kata syari'ah berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum.¹¹⁸ Kemudian, bangsa Arab menggunakan kata ini untuk konotasi jalan lurus. Dan saat dipakai dalam pembahasan hukum menjadi bermakna “segala sesuatu yang disyari'atkan Allah kepada hamba-hamba-Nya”,¹¹⁹ sebagai jalan lurus untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Di dalam Al-Qur'an kata “syariah” muncul dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti dalam Surah Al-Maidah ayat 48, As-Syura ayat 13 dan Al-Jasiah ayat 18, yang mengandung arti jalan yang jelas dan membawa kepada kemenangan.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy¹²⁰, syariah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Sedangkan *Mahuod Syaltut* mengartikan syariah adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan tersebut untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia dalam hubungannya dengan Allah, dengan umat manusia lainnya, orang Islam dengan non muslim, dengan alam maupun dalam menata kehidupan ini.

Dari definisi tersebut, syariah dalam konotasi Islam terbagi dalam dua macam, yaitu *syariah ilahi (tasyri' samawi)* dan *syariah wadhi (tasyri wadhi)*. Yang dimaksud dengan *syariah ilahi* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang langsung dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai norma-norma hukum yang berlaku secara

¹¹⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 2.

¹¹⁸ Manna' al-Qattan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, Muassasah al-Risalah, t.t., h. 14.

¹¹⁹ Muhammad Faruq Nabhan, *al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*, Dar al-Qolam, Beirut, 1981, h. 10.

¹²⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, h. 29.

universal untuk semua waktu dan tempat, tidak bisa berubah karena tidak ada yang kompeten untuk mengubahnya.

Sedangkan *syariah wadhi* adalah ketentuan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid, baik mujtahid mustanbith maupun mujtahid muthaliq. Kajian hukum para mujtahid ini tidak memiliki sifat keabadian dan bisa berubah sesuai dengan kondisi tempat dan waktu.¹²¹

C. Wewenang Peradilan Agama Dalam Sejarah Indonesia

1. Sebelum kemerdekaan:

- a. *Staatsblaad* 1882 No. 152 tidak disebutkan secara tegas kewenangan Peradilan Agama, hanya disebutkan bahwa wewenang Peradilan Agama itu berdasarkan kebiasaan dan biasanya menjadi ruang lingkup wewenang Peradilan Agama adalah: hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, talak, rujuk, wakaf, warisan.
- b. *Staatsblaad* 1937 No. 116 (Jawa dan Madura): Peradilan Agama hanya berwenang memeriksa perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk.
- c. Pada masa ini wakaf, tuntutan nafkah, hadhanah, pemecatan wali nikah, perkara kewarisan, hibah wasiat, sedekah bukan kewenangan PA.

2. Setelah kemerdekaan:

- a. PP No. 45 Tahun 1957: Peradilan Agama berwenang mengadili perkara nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, maskan (tempat kediaman), mut'ah, hadanah, waris, wakaf, hibah, sadakah, baitul maal.
- b. SK. Menag No. 6 Tahun 1980: Nama untuk peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama. Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama.
- c. Pasal 49 s/d 53 UU No. 7 Tahun 1989: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

¹²¹ Mahmoud Syault, *al-Islam, Aqidah wa Syari'ah*, sebagaimana dikutip Abdul Manan, "Reformasi Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 41.

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah”.

3. Kewenangan Peradilan Agama Masa Sekarang:

Sebagaimana isi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Warisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Sedekah
- i. Ekonomi Syariah

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006:

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

a. Huruf (a):

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) izin beristri lebih dari seorang;
- 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) dispensasi kawin;

- 4) pencegahan perkawinan;
- 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) pembatalan perkawinan;
- 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) perceraian karena talak;
- 9) gugatan perceraian;
- 10) penyelesaian harta bersama;
- 11) penguasaan anak-anak;
- 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
- 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) pencabutan kekuasaan wali;
- 17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Huruf (c)

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Huruf (d)

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Huruf (e)

Yang dimaksud “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

f. Huruf (f)

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Huruf (g)

Yang dimaksud “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau

menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.

h. Huruf (h)

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/ badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.

i. Huruf (i)

Yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- 1) bank syariah
- 2) lembaga keuangan mikro syariah
- 3) asuransi syariah
- 4) reasuransi syariah
- 5) reksa dana syariah
- 6) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- 7) sekuritas syariah
- 8) pembiayaan syariah
- 9) pegadaian syariah
- 10) dana pensiun lembaga keuangan syariah
- 11) bisnis syariah

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006:

- a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006:

- 1) Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
- 2) Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.
- 3) Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.
- 4) Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama.
- 5) Dalam hal objek sengketa lebih dari dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Pasal 52 A, berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Penjelasan Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006:

Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu)

Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.



BAB III
KONTROVERSI TERKAIT PERLUASAN KEWENANGAN BIDANG
EKONOMI SYARIAH PADA PERADILAN AGAMA SERTA
ALTERNATIF SOLUSINYA

A. Kontroversi Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Kemudian seiring berjalannya waktu lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang Perbankan Syariah. Hal inilah yang memicu kontroversi pendapat beberapa kalangan pakar hukum di Indonesia.

Sebagaimana tercermin dalam pasal 55 ayat (2) dan penjelasan huruf (d), ternyata Undang-Undang memberikan opsi penyelesaian perkara perbankan syariah melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Adanya opsi kompetensi peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam bidang perbankan syariah, menunjukkan adanya reduksi dan penyempitan serta mengarah pada dualisme kompetensi dalam mengadili oleh dua lembaga litigasi-walaupun kompetensi yang diberikan kepada Peradilan Umum adalah berkaitan dengan isi suatu akad, khususnya mengenai *choice of forum* dan *choice of litigation*.

Menurut Pasal 55 ayat 1, dinyatakan bahwa lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Peradilan Agama. Hal ini memperkuat atau sejalan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Secara yuridis, tidak ada yang dilanggar dalam Pasal 55 ayat 1 tersebut karena telah sinkron dengan Undang-Undang yang mengatur sebelumnya.

Selanjutnya penjelasan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan apabila para pihak memperjanjikan maka penyelesaian dapat dilakukan sesuai akad. Apabila dilihat dari penjelasan Pasal 55 ayat 2 tersebut, pilihan penyelesaian sesuai akad dibatasi, di antaranya melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Pilihan melalui non-litigasi adalah jalur musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), sementara jalur litigasi adalah melalui Peradilan Umum.

Ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lahir, Peradilan Agama secara absolut menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada pandangan pembuat Undang-Undang bahwa dua-duanya (Pengadilan Agama-Pengadilan Negeri) berwenang mengadili. Dalam hal ini indikasi adanya politik hukum.

Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara yuridis dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kenapa Undang-Undang yang datang kemudian bisa bertentangan dengan Undang-Undang yang sebelumnya sudah mengatur tentang forum penyelesaian sengketa?

B. Latar Belakang Perluasan Wewenang Peradilan Agama

Pada mulanya kegiatan ekonomi syariah ini sangat menarik perhatian banyak kalangan, baik akademisi maupun para praktisi.¹²² Ekonomi syariah memiliki perbedaan dalam mengatasi persoalan ekonomi yang didasarkan pada ajaran Syariat Islam.¹²³ Bagi kegiatan ekonomi syariah dalam menjalankan aktifitasnya tidak hanya kegiatan usaha, atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, namun juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Termasuk jika

¹²² Renny Supriyatni Bachro, *Sistem Bagi Hasil dengan Mekanisme Pembagian Untung dan Rugi*, Unpad Press, Bandung, 2010, h. 12.

¹²³ Mochtar Naim, *Kompendium Himpunan Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Hukum*, Hasanah, Jakarta, 2001, h. 327-344.

terjadi sengketa antara pelaku ekonomi syariah, semua harus didasarkan dan diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah.¹²⁴

Dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi syariah, maka peluang terjadinya sengketa, konflik (*dispute*) antara para pelaku ekonomi syariah juga semakin besar. Suatu sengketa bermula dari perselisihan yang kemudian berlarut-larut tidak terselesaikan antara para subjek hukum yang sebelumnya telah mengadakan hubungan hukum perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkannya berjalan tidak harmonis.¹²⁵ Terganggunya hak salah satu pihak merupakan kepentingan hukum.

Semakin banyak dan luas kegiatan bisnis maka frekuensi terjadinya sengketa juga semakin tinggi, dapat diartikan makin banyak pula sengketa yang harus diselesaikan. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Penyelesaian sengketa merupakan cara, prosedur ataupun mekanisme yang ditempuh oleh para pihak guna penyelesaian perselisihan atau konflik atas perbedaan kepentingan mereka.

Penyelesaian sengketa ekonomi secara litigasi di pengadilan merupakan *ultimum remedium* melalui lingkungan peradilan yang berwenang. *Ultimum remedium* berupa tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila tidak diperoleh upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Saat ini di Indonesia lingkungan peradilan yang mempunyai kewenangan dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi yaitu lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan agama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 ditetapkanlah Pengadilan Agama sebagai penyelesai sengketa ekonomi syariah. Dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama sebagai pemutus sengketa ekonomi syariah membawa konsekuensi hukum bahwa pengadilan negeri tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

¹²⁴ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, h. 5.

¹²⁵ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, h. 12.

Salah satu poin penting dari adanya amandemen terhadap Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dikarenakan transaksi (akad) ekonomi syariah yang dilakukan adalah berdasarkan kepada syariat Islam, sehingga sudah pada tempatnya apabila terjadi persengketaan, maka lembaga peradilan agama diberi kepercayaan berupa kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

C. Argumen Terkait Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Berikut ini adalah beberapa pendapat pakar hukum mengenai perluasan kewenangan bidang ekonomi syariah menjadi kompetensi Peradilan Agama:

1. Sutan Remy Sjahdeini, salah seorang pakar hukum di Indonesia, menyatakan bahwa hukum Islam bukan merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena itu, Peradilan Agama (PA) tidak dapat dipaksakan untuk menyelesaikan perkara yang timbul antara bank syariah dan nasabahnya, melainkan diberlakukan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdato.
2. Hanawijaya, Direktur Perbankan Syariah Mandiri, berpendapat bahwa peradilan agama tidak berwenang sebagai lembaga eksekutorial terhadap putusan Basyarnas. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), yang berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah Peradilan Umum (PU).
3. Taufiq (Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung) mengemukakan pandangan yang berbeda. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sekarang sudah tidak bisa diberlakukan, karena “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah *lex generalis*, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu *lex specialis*.”
4. Abdurrahman (Hakim Agung MA) sependapat dengan Taufik. Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kompetensi absolut kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah pada

Pengadilan Agama. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk melakukan penyelesaian secara non litigasi. Bentuk penyelesaian alternatif yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga Pengadilan Agama perlu untuk mengesekutinya dengan sebaik-baiknya.¹²⁶ Namun menurut Abdurrahman, perlu disadari bahwa Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) masih mempunyai kelemahan mendasar, karena dalam UUPA sama sekali tidak mencantumkan ketentuan pasal peralihan. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) perlu direvisi agar tidak menghambat kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

5. Andi Syamsu Alam, Ketua Muda Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung, berpendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) soal kompetensi peradilan agama dalam mengeksekusi putusan Basyarnas. Menurutnya, “Paling tidak ada dua hal yang nanti direkomendasikan kepada Mahkamah Agung (MA): *Pertama*, membuat Perma soal kompetensi peradilan agama dalam mengeksekusi putusan Basyarnas; *Kedua*, perkara ekonomi syariah nanti diselesaikan tidak lebih dari 180 hari.”
6. Adiwarman A. Karim, Presiden Direktur Karim Bussiness Consulting, melontarkan pandangan yang berbeda. Menurutnya, dalam hukum berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan yang akan mengikat mereka. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, para pihak yang berperkara bebas memilih peradilan mana (*choice of forum*) yang akan digunakan ketika terjadi perselisihan atau persengketaan. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah, forum yang selama ini digunakan adalah peradilan umum dan badan arbitrase. Artinya, UU No. 3 Tahun 2006 pada dasarnya hanya menambah pilihan forum bagi pelaku perbankan syariah, yakni Peradilan Agama.

¹²⁶ Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012)*, dalam Majalah Peradilan Agama edisi 3 Desember 2013-Februari 2014, h. 43.

7. Rifyal Ka'bah¹²⁷ berpendapat bahwa syariah itu bukan milik peradilan agama saja tapi milik semua jadi tidak perlu dipermasalahkan penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang memberi peluang pengadilan negeri untuk menangani perkara ekonomi syariah karena Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk Majelis Hakim yang memahami ekonomi syariah.

D. Alternatif Solusi Dari Kontroversi

1. Menurut Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits

Al-Quran menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas, manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud.

Pola penyelesaian sengketa menurut Al-Qur'an dan Hadits yaitu:

a. Perdamaian (*Ishlah*)

Ishlah merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh Al-Quran. Pada dasarnya setiap konflik yang terjadi antara orang-orang yang beriman harus diselesaikan dengan damai (*ishlah*). *Ishlah* adalah suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia. Namun kata *ishlah* lebih menekankan arti suatu proses perdamaian antara dua pihak. Sedangkan kata *shulh* lebih menekankan arti hasil dari proses *ishlah* tersebut yaitu berupa *shulh* (perdamaian/kedamaian).

Allah berfirman dalam Surat Al-Hujurat ayat 9-10:

¹²⁷ Rifyal Ka'bah, "Studi Banding Hukum Ekonomi Suariah ke Beberapa Negara" makalah disampaikan pada seminar tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Yogyakarta, 10 September 2008.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ
 فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ (الحجرات: ٩-١٠)

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 9-10)¹²⁸

Surat Al-Hujurat ayat 9-10 merupakan landasan dan sumber penyelesaian konflik yang terjadi diantara orang-orang yang beriman, yaitu apabila mereka terlibat konflik selesaikanlah dengan damai (*faashlihu*). Cara *ishlah* ini kemudian berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dewasa ini dipraktekkan pengadilan di Indonesia melalui mediasi. *Ishlah* disebut dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran sebagai berikut:

1. *Ishlah* antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil; Q.S. Al-Hujurat: 9-10.

¹²⁸ Ahsin Sakho Muhammad, *Mushaf Maqamat*, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2013, Juz 26, h. 515.

2. *Ishlah* antara suami-isteri yang di ambang perceraian; dengan mengutus Al-Hakam (juru runding) dari kedua belah pihak; Q.S. An-Nisa: 35.
3. *Ishlah* memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar; An-Nisa: 114.
4. *Ishlah* itu baik, terutama *ishlah* dalam sengketa rumah tangga (An-nisa: 128).

Dalam Hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَابْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : «الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . إِلَّا صَلَاحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا . وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

Artinya: “Al-Hasan bin Ali Al-Hilal meriwayatkan hadits kepada kami, dari Abu Amir al-Aqdi, dari Katsir bin Abdullah bin ‘Amr bin Auf al-Muzni, dari ayahnya, dari ayah-ayahnya (kakeknya), dari Rasulullah SAW bersabda: *al-Sulh* itu *jaiz* (boleh) antara (bagi) umat Islam, kecuali *sulh* yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya (menghalalkan yang haram). Dan umat Islam boleh berdamai (dengan orang kafir) dengan syarat yang mereka ajukan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya.” Abu Isa berpendapat bahwa Hadits ini tergolong Hasan-Shahih.

Dua ayat di dalam Surat Al-Hujurat dan Hadits di atas merupakan landasan di dalam penyelesaian konflik dan perselisihan. Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa menyelesaikan konflik dengan perdamaian adalah boleh dan sangat dianjurkan untuk kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan rasul-Nya.

Bila dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya, maka *ishlah* bisa dikategorikan sebagai bentuk mediasi. Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para yang bersengketa.

b. Musyawarah

Secara etimologis, musyawarah berasal dari kata *syawara*, yaitu berunding, berembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Makna dasar dari kata musyawarah adalah mengeluarkan dan menampakan (*al-istikhraju wa al-izhar*). Secara terminologis, musyawarah diartikan sebagai upaya memunculkan sebuah pendapat dari seorang ahli untuk mencapai titik terdekat pada kebenaran demi kemaslahatan umum.

Islam telah menganjurkan musyawarah dan memerintahkannya dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, ia menjadikannya sesuatu hal terpuji dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara serta menjadi elemen penting dalam kehidupan umat, ia disebutkan dalam sifat-sifat dasar orang-orang beriman dimana keislaman dan keimanan mereka tidak sempurna kecuali dengannya, ini disebutkan dalam surat khusus.¹²⁹

Allah berfirman dalam Surat Asy-Syuura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾ (الشورى: ٣٨)

¹²⁹ www.mozaikislam.com

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yg menerima (mematuhi) seruan Tuhannya & mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy-Syuura: 38).¹³⁰

Oleh karena kedudukan musyawarah sangat agung maka Allah SWT menyuruh Rasul-Nya melakukannya, Allah berfirman dalam Surat Ali-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ (آل عمران: ١٥٩)

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (QS. Ali-Imran: 159).¹³¹

Hadist dari Al Adabun Nabawi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ. (رواه الترمذي و ابو داود).

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda “Musyawarah adalah dapat di percaya.” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud).

¹³⁰ Ahsin Sakho Muhammad, *Mushaf Maqamat*, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2013, Juz 25, h. 487.

¹³¹ *Ibid.*, Juz 6, h. 108

Jika dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya, maka musyawarah bisa dikategorikan ke dalam bentuk negosiasi. Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau 'urung rembuk'. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat langsung dalam dialog dan prosesnya.

c. Arbitrase Syariah (Tahkim)

Untuk menyelesaikan perkara perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (mediator). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai. Pengangkatan pihak ketiga sebagai mediator dapat dilakukan secara formal maupun nonformal. Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan atau sengketa arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam hukum syariah, istilah arbitrase lebih dikenal dalam sebutan tahkim. Istilah tahkim berasal dari kata "hakkama" yang secara harfiah berarti mengangkat (seseorang) menjadi wasit. Sedangkan secara terminologi, tahkim dapat diartikan sebagai pengangkatan seseorang menjadi wasit dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa. Dengan kata lain, pengertian tahkim ialah tempat bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Karena tahkim merupakan aktivitas penunjukkan wasit, maka orang yang ditunjuk itu disebut hakim.

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

(النِّسَاء: ٣٥)

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa: 35)¹³²

2. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012¹³³

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 93/ PUU-X/2012 menyampaikan pertimbangan hukum melalui pendapatnya dalam 4 halaman (35-38). Mahkamah Konstitusi menilai ada beberapa poin yang menjadi perhatian, yaitu:

- a. Timbulnya sengketa dalam perbankan syariah disebabkan adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Jika terjadi permasalahan, maka sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan tugas dan kewenangan kepada Pengadilan Agama, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- b. Secara sistematis, penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Mahkamah Konstitusi yang menjadi pilihan pertama adalah pengadilan agama, dan pilihan keduanya adalah sesuai akad.
- c. Adanya ketentuan sesuai akad harus tertera secara jelas dalam akad perjanjian. Para pihak bersepakat untuk memilih salah satu forum hukum dalam menyelesaikan sengketa bilamana para pihak tidak

¹³² Ibid., Juz 5, h. 84

¹³³ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi*, UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 48.

ingin menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama. Namun, persoalannya muncul jika dalam akad tersebut tidak tertera secara jelas forum hukum apa yang dipilih.

Perihal penyelesaian sesuai akad, Majelis Hakim berpendapat:

“Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, akad (perjanjian) merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, terlebih lagi Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu, kejelasan dalam penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan. Para pihak seharusnya secara jelas menyebutkan salah satu forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa”.

Asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian perbankan syariah, boleh saja diterapkan. Akan tetapi, kebebasan berkontrak tersebut harus patuh dan tidak boleh melanggar ketentuan Undang-Undang, diantaranya ketentuan berkaitan dengan penyelesaian sengketa.

- d. Pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian dan menimbulkan adanya persoalan konstitusionalitas. Pada akhirnya dapat memunculkan ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak Unit Usaha Syariah.

Terhadap poin keempat ini, Mahkamah menilai bahwa: “Ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak member kepastian hukum”.

Selanjutnya, Mahkamah memberikan pandangan sebagai berikut:

“Berdasarkan kenyataan yang demikian, walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara konkrit, telah cukup bukti bahwa ketentuan Penjelasan pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah”.

Atas kesimpulan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dalam Nomor 93/PUU-X/2012 sebagai berikut:

- a. Penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan lain karena akan melanggar prinsip yurisdiksi absolut.

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara hukum mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam perkara ekonomi syariah. Artinya secara hukum tidak boleh lagi ada nasabah dan bank syariah membuat klausul penyelesaian sengketa dengan memilih pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dengan berlindung di balik asas kebebasan berkontrak. Secara normatif apabila dalam klausula penyelesaian sengketa masih memuat pilihan forum berupa pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, maka klausula dimaksud bersifat batal demi hukum (*null and void*). Dalam hal ini bahwa tidak dimungkinkan melakukan pilihan forum litigasi dengan menunjuk lingkungan peradilan lain. Pilihan untuk sengketa di bidang perdagangan hanya dimungkinkan terhadap forum non-litigasi.

Dengan mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 bersifat final and binding, maka sudah seharusnya pihak-pihak terkait menaati putusan dimaksud. Artinya dalam hal terdapat klausul yang menunjuk pengadilan di lingkungan Peradilan Umum di suatu wilayah, apabila sengketa benar-benar terjadi dan diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri wajib menyatakan tidak berwenang sehingga diktum putusannya adalah tidak menerima gugatan dari penggugat. Apabila dalam praktiknya nanti, Majelis Hakim pengadilan di lingkungan Peradilan Umum menerima sengketa yang menunjuknya sebagai forum penyelesaian sengketa, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menjadikannya sebagai alasan melakukan upaya hukum, khususnya berupa kasasi. Hal ini sangat dimungkinkan karena dengan menerima sengketa atas dasar penunjukkan forum, maka Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum.



BAB IV

ANALISIS

A. Pemikiran Pakar Hukum Yang Setuju Terhadap Perluasan Bidang Ekonomi Syariah Menjadi Kompetensi Peradilan Umum

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, salah seorang pakar hukum di Indonesia, menyatakan bahwa hukum Islam bukan merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena itu, Peradilan Agama tidak dapat dipaksakan untuk menyelesaikan perkara yang timbul antara bank syariah dan nasabahnya, melainkan diberlakukan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Sedangkan Hanawijaya, Direktur Perbankan Syariah Mandiri, juga berpendapat bahwa peradilan Agama tidak berwenang sebagai lembaga eksekutorial terhadap putusan Basyarnas. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), yang berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah Peradilan Umum (PU).

Selain itu, Adiwarman A. Karim, Presiden Direktur Karim Bussiness Consulting, melontarkan pandangan yang berbeda. Menurutnya, dalam hukum berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan yang akan mengikat mereka. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, para pihak yang berperkara bebas memilih peradilan mana (*choice of forum*) yang akan digunakan ketika terjadi perselisihan atau persengketaan. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah, forum yang selama ini digunakan adalah peradilan umum dan badan arbitrase. Artinya, UU No. 3 Tahun 2006 pada dasarnya hanya menambah pilihan forum bagi pelaku perbankan syariah, yakni Peradilan Agama.

Hukum positif atau *ius constitutum* adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum positif Indonesia adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, yaitu berupa

hubungan antar manusia, hubungan antar manusia dengan masyarakat dan sebaliknya hubungan masyarakat dengan manusia anggota masyarakat itu.

Hukum positif di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang tertulis dan diterapkan. Hukum tertulis ini seakan menjadi *pattern* dalam melaksanakan sistem hukum di Indonesia, seperti UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Pidana juga merupakan contoh dari hukum tertulis di Indonesia. Hukum tidak tertulis merupakan hukum kebiasaan atau hukum ada yang sudah berlaku turun temurun. Hukum ini tidak pernah ditulis dan diarsipkan sebagaimana hukum tertulis, namun berlaku dan menjadi paten di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Perjanjian secara formal-materiil mempunyai kedudukan sama dengan Undang-Undang. Dinilai secara materiil karena perjanjian dan Undang-Undang sama-sama sebagai sumber perikatan. Isi dari sebuah perjanjian nilainya sama dengan Undang-Undang. Dengan demikian, kekuatan perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah cukup mengikat kepada kedua belah pihak yang kekuatannya sama seperti diatur oleh Undang-Undang.

Dalam transaksi perbankan contohnya, perjanjian sangat menentukan terhadap isi, bentuk dari fasilitas perbankan yang diperjanjikan. Termasuk mengenai klausul penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang melakukan transaksi, yaitu bank dan nasabah, pada dasarnya mempunyai kebebasan untuk menentukannya. Setelah ditentukan, masing-masing pihak harus mentaatinya seperti halnya menaati sebuah Undang-Undang. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa syarat sah suatu perjanjian terdiri dari empat unsur yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Keempat unsur tersebut digolongkan ke dalam dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif ini mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan Unsur obyektif ini meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.

Bilamana persyaratan di atas tidak dapat dipenuhi maka akan mengakibatkan perjanjian menjadi cacat hukum. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya unsur subyektif adalah perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika yang tidak terpenuhi adalah unsur obyektif maka perjanjian itu batal demi hukum.

Dalam hal ini dapat saja sengketa hak keperdataan dimungkinkan untuk diselesaikan di luar pengadilan negara, baik melalui arbitrase maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa. Hal tersebut dapat dilakukan melalui perjanjian atau kesepakatan/ akad tertulis yang disepakati para pihak, baik sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah terjadinya sengketa dimaksud (akta kompromi) sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*.

Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad atau perjanjian tersebut (vide Pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian, perjanjian atau akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (vide Pasal 1320 KUH Perdata).

Maka agar suatu perjanjian memenuhi syarat “suatu sebab yang halal”, maka sebab dibuatnya akad atau perjanjian tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Perjanjian atau akad yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi batal demi hukum.

Dengan demikian dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa “Perjanjian atau akad yang mencantumkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi”.

Pertimbangannya adalah karena bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan absolut yang ditentukan oleh konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945) yang ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang lebih dahulu diterbitkan. Dan sebagaimana asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yaitu apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-Undangan yang bersifat khusus (*special*) dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*), maka peraturan perundang-undangan yang bersifat umum akan dikesampingkan.

Maka atas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/ PUU-X/2012 tersebut, idealnya tidak ada lagi persoalan yang timbul mengenai kepastian hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah.

B. Pemikiran Pakar Hukum Yang Cenderung/ Setuju Terhadap Perluasan Bidang Ekonomi Syariah Menjadi Kompetensi Peradilan Agama

Menurut pendapat Taufiq (Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung) dan Abdurrahman (Hakim Agung MA), mengemukakan pandangan yang berbeda. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sekarang sudah tidak bisa diberlakukan, karena “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah *lex generalis*, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu *lex specialis*. ”Namun menurut Abdurrahman, perlu disadari bahwa Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) masih mempunyai kelemahan mendasar, karena dalam UUPA sama sekali tidak mencantumkan ketentuan pasal peralihan. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) perlu direvisi agar tidak menghambat kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Adapun pendapat Andi Syamsu

Alam, Ketua Muda Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung, berpendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) soal kompetensi peradilan agama dalam mengeksekusi putusan Basyarnas. Menurutnya, “Paling tidak ada dua hal yang nanti direkomendasikan kepada Mahkamah Agung (MA): *Pertama*, membuat Perma soal kompetensi peradilan agama dalam mengeksekusi putusan Basyarnas; *Kedua*, perkara ekonomi syariah nanti diselesaikan tidak lebih dari 180 hari”.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan serapan dari hukum Islam di bidang muamalat yang sudah berlaku di Indonesia sejak lama. Hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia hingga saat ini, bahkan di beberapa daerah telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat yang dianggap sakral.

Salah satu faktor menjadikan hukum Islam mengakar dan membudaya di masyarakat adalah karena fleksibilitas dan elastisitasnya. Meskipun tergolong hukum otonom, akan tetapi hukum Islam sangat implementatif dan aplikatif dengan berbagai jenis budaya lokal. Oleh karenanya, sangat tepat jika penyelesaian perkaranya dilakukan oleh Peradilan Agama, sebagaimana telah berjalan dan dipraktikkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bila kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah, dialihkan kepada yang lain, maka terdapat kemungkinan tidak terwujudnya rasa keadilan dan ketentraman sebagaimana tercermin dalam tujuan dan praktik akad yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Hal demikian dapat dianalogikan seperti seseorang yang menikah dengan akad Islam, tetapi perceraianya menggunakan hukum non Islam.

Secara yuridis Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan mutlak/ absolut bagi Peradilan Agama untuk bisa menerima, mengadili dan memutuskan perkara-perkara perbankan syariah sebagai bagian dari cabang muamalat keislaman.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, ketentuan mengenai kewenangan dan kompetensi lingkungan peradilan agama telah

diatur sedemikian rupa dalam Pasal 49 s.d Pasal 53, Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai kewenangan absolut maupun mengenai kewenangan relatif lingkungan peradilan agama.

Secara sosiologis bahwa persoalan yang terkait dengan transaksi ekonomi syariah sudah lama hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Oleh karenanya, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sudah tepat dengan memberikan kompetensi perkara perbankan dan lembaga keuangan syariah kepada Peradilan Agama. Mengenai pengalihan wewenang mengadili sengketa perbankan syariah dari Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri, dipastikan secara horizontal bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dikaitkan pula sesuai *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

C. Pandangan/ Perspektif Hukum Islam Tentang Kompetensi Bidang Tersebut

Pelembagaan Hukum Islam atau Syariah dalam sistem hukum nasional adalah selaras dengan Pancasila sebagai ideologi, falsafah dan dasar negara serta tidak lain merupakan penjabaran dari sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Filosofis Hukum Islam di Indonesia diterima bersamaan dengan keberadaan agama Islam, karena hukum Islam merupakan bagian atau salah satu inti dari ajaran Islam, di samping aqidah dan akhlak. Hal ini dikarenakan bagi umat Islam, keterikatan terhadap hukum Islam merupakan “imani” atau berkaitan langsung dengan aqidah, sehingga seorang muslim yang beriman merasa mutlak terikat untuk berhukum dengan hukum Allah (hukum Islam), sebagai konsekuensi ketaatannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya Muhammad SAW.

Menjalankan hukum Islam berarti melaksanakan perintah Allah untuk menuju kemaslahatan atau kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Demikian juga menjadi keyakinan bagi seorang muslim bahwa menjalankan hukum yang bertentangan dengan hukum Islam, melanggar

batas-batas ketentuan Allah berarti berbuat dosa yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Doktrin ini tertanam dalam hati setiap muslim, sehingga ia tidak dapat melepaskan atau memisahkan diri dari hukum agama yang diyakininya. Ia pasti menerima otoritas hukum Islam dan taat kepada hukum Islam, meskipun tingkat ketaatan setiap orang muslim berbeda-beda, tergantung taqwanya kepada Allah SWT.

Hukum Islam memiliki jangkauan paling jauh dan alat efektif dalam membentuk tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat Islam. Otoritas moral hukum (Islam) membentuk struktur sosial Islam yang rapi dan aman melalui semua fluktuasi keberuntungan politis. Hukum Islam memiliki norma-norma etika baik dan buruk, kejahatan dan kebajikan di mana masyarakat secara ideal harus menyesuaikan diri dengannya, karena hukum ini mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan semua cabang kesusasteraan.

Penerimaan Hukum Islam oleh masyarakat Islam di Indonesia sebelum kedatangan bangsa Belanda ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam yang menyebar di berbagai wilayah Indonesia seperti di Sumatera yang berpengaruh adalah Aceh, di Jawa kerajaan Demak dan Banten, Sulawesi adalah Gowa dan Ternate yang pengaruhnya meluas hingga kepulauan Philipina. Penerimaan hukum Islam secara politis ditunjang oleh sistem pemerintahan dalam kerajaan, yang menjadikan Islam sebagai agama kerajaan dengan memberlakukan norma hukum Islam dalam wilayahnya di samping hukum adat. Hukum Islam ditegakkan melalui lembaga Peradilan Agama dengan berbagai nama, seperti Kerapatan Qadi, Hakim Syara', Pengadilan Serambi, sementara hukum adat melalui lembaga adat.

Praktik hukum yang hidup dalam masyarakat Islam selalu bertumpu pada kaidah "*al-adatu muhakkamah*" (adat dapat dijadikan hukum). Hukum adat dengan hukum Islam berasimilasi dan saling mengadopsi. Masyarakat Islam menerima otoritas hukum Islam, walaupun mereka juga tetap mentaati hukum lain asal tidak bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam.

Secara filosofis dalam pendekatan teologi, umat Islam sangat meyakini bahwa "Allah Maha Sempurna" demikian pula hukum yang diturunkan-Nya, dan hanya Allah lah yang lebih tepat mengatur manusia

sebagai ciptaan-Nya, karena Dialah yang lebih mengetahui seluk beluk kehidupan manusia sebagai ciptaan-Nya. Dalam pengkajian terhadap Al-Qur'an terlihat bahwa secara konseptual ada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mencakup penerapan dan pentaatan terhadap hukum Islam bagi orang Islam.

Cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan perintah atau ajakan untuk memperhatikan dan menjalankan hukum Allah, baik yang tertuang langsung secara rinci dalam Al-Qur'an, yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam Sunnah, maupun yang telah diinterpretasikan dari Al-Qur'an dan Sunnah oleh para ulama melalui ijtihad.

Penerimaan hukum Islam bagi seorang muslim merupakan ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan Ulil Amri yang diperintahkan langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam Surah An-Nisa ayat 58-59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٩٥.٨٥ : النساء : ٥٨-٥٩)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 58-59)¹³⁴

¹³⁴ Ahsin Sakho Muhammad, *Mushaf Maqamat*, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2013, Juz 4, h. 87.

Kandungan utama dalam kedua ayat tersebut adalah:

- e. Perintah menunaikan amanah.
- f. Perintah berlaku adil dalam menetapkan hukum.
- g. Perintah taat kepada Allah, Rasulullah dan Ulil Amri.
- h. Perintah menyelesaikan perselisihan dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ulama memandang ayat di atas sebagai pokok hukum yang menghimpun segala ajaran agama.

Ayat yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa sebagai umat Islam harus taat kepada Allah termasuk hukum Allah, ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah SWT. Keimanan akan wujud Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat, kodrat dan iradat Allah. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradat Allah dan karena itu, maka kepatuhan menjalankan aturan Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, merupakan perwujudan dari iman kepada Allah.

Ulil Amri adalah sebuah lembaga yang terdiri dari para amir, hakim, ulama, kepala pasukan militer dan seluruh ketua dan pemimpin masyarakat yang menjadikan rujukan dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan umum. Lembaga ini dikenal pula sebagai *ahl al-hall wa al-aqd* (pemegang kekuasaan pembahas dan penyimpul masalah). Apabila mereka telah bersepakat dalam menetapkan sebuah urusan atau hukum, wajib ditaati, asal saja kelompok tersebut merupakan bagian dari masyarakat muslim, tidak menyalahi ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Peradilan Agama merupakan satu institusi bagi masyarakat Islam. Secara filosofis ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat yang merupakan perwujudan *tauhid illah* guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, Ia merupakan bagian dari supra struktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, Ia merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah SAW dan berkembang dari masa ke masa serta menjadi bagian dari sistem peradilan nasional berdasarkan Undang-Undang. Secara sosiologis Ia

lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat majemuk.

Sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan bidang ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Oleh karena itu, kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa pengadilan negeri tidaklah sesuai untuk menangani sengketa lembaga keuangan syariah. Pasalnya lembaga ini memiliki dasar-dasar hukum penyelesaian perkara yang berbeda dengan yang dikehendaki pihak-pihak yang terikat dalam akad syariah. Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian sebuah perkara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa terhadap pemikiran pakar hukum yang setuju penyelesaian perkara ekonomi syariah kepada Peradilan Umum dilandaskan pada beberapa alasan yaitu bahwa akad atau perjanjian merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad atau perjanjian tersebut (vide Pasal 1338 KUH Perdata). Namun perjanjian atau akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (vide Pasal 1320 KUH Perdata). “Perjanjian atau akad yang mencantumkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi”. Karena sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Perjanjian atau akad yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi batal demi hukum.
2. Bahwa terhadap pemikiran pakar hukum yang setuju penyelesaian perkara ekonomi syariah kepada Peradilan Agama dilandaskan pada beberapa alasan yaitu bahwa apabila kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah dialihkan kepada yang lain, maka terdapat kemungkinan tidak terwujudnya rasa keadilan dan ketentraman sebagaimana tercermin dalam tujuan dan praktik akad yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Hal demikian dapat dianalogikan seperti seseorang yang menikah dengan akad Islam, tetapi perceraianya menggunakan hukum non Islam. Dan secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 49, sebenarnya telah dinyatakan Peradilan Agama memiliki

kewenangan mutlak/ absolut untuk bisa menerima, mengadili dan memutuskan perkara di bidang ekonomi syariah.

Oleh karena itu, sangatlah tepat jika penyelesaian perkara ekonomi syariah dilakukan oleh Peradilan dalam lingkup Pengadilan Agama.

3. Selanjutnya, pandangan/ perspektif hukum Islam mengenai kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah bahwa bagi seorang muslim (umat Islam) menjalankan hukum yang bertentangan dengan hukum Islam, melanggar batas-batas ketentuan Allah berarti berbuat dosa yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Peradilan Agama merupakan satu institusi bagi masyarakat Islam yang dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan Allah guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri tidaklah sesuai untuk menangani sengketa lembaga keuangan syariah karena tidak memiliki dasar-dasar hukum penyelesaian perkara sebagaimana yang dikehendaki pihak-pihak yang terikat dalam akad syariah. Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian sebuah perkara melainkan hal tersebut hanya digunakan pada lembaga Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Kompetensi peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah sudah memiliki landasan kuat. Untuk itu perlu kesungguhan dari setiap elemen, terutama pihak perbankan syariah untuk menetapkan Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa melalui litigasi.
2. Para pelaku bisnis tidak perlu ragu apabila mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi syariah untuk menyelesaikan pada lembaga Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abubakar, Al Yasa', *Syari'at Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2005.
- Abu Bakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturn Perundang-Undangan Peradilan Agama*, Al-hikmah, Jakarta, 1995.
- Abdullah, Abdul Gani, *Lembaga Peradilan Agama Sebelum Tahun 1882*, dalam Pembimbing, Tahun IV No. 17.
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
- Abi al-Dam, *Adabil Qada'*.
- Abidin, A. Zainal, *Rule of Law dan Hak-hak Sosial Manusia dalam Rangka Pembangunan Nasional di Indonesia*, Majalah LPHN, No. 10, 1970.
- Al Fanjani, Muhammad Syaukani, *Al Wajiz fi al Istishad al Islami*, terjemahan Muzakir A.S. dengan judul *Ekonomi Islam Masa Kini*, Husaini, Bandung, 1989.
- Al- Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, jilid IV, Sulaiman Mar'i, Singapura, 1960.
- Ali, Muhammad Daud, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam, UUPA dan Masalahnya, Dalam Cik Basri Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Ulul Albab Press, Bandung.
- Ali, Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Al-Syafi'i, *Al-Um*.
- Anggraini, Antennas, *Orang-Orang Terkemuka dalam Sejarah Kalimantan*, Penerbit Karya, tt.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*.

Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* Kencana, Jakarta, 2008.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Al-Farra', Abi Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*.

Abu Dawud, Sunan Abi Dawud.

At-Tirmizi, *Al-Jami'u*.

Azizy, A Qadri, *Ekletisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gema Meida, Yogyakarta, 2002.

Bachro, Renny Supriyatni, *Sistem Bagi Hasil dengan Mekanisme Pembagian Untung dan Rugi*, Unpad Press, Bandung, 2010.

Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.

Benda, Harry J, *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under The Japanese Occupation 1942-1945*, W. Van Hoeve, Bandung, 1958.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Departemen Agama, *Sketsa Peradilan Agama*.

Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Firdaus, *Syari'at Islam di Negeri Syari'ah*, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2004.

Friedman, Lawrence Meir, *American Law: an Introduction, second edition*, W.W. Norton & Company, New York, 1998.

H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, The University of Chicago Press, Chicago 1950.

Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*.

Hasan, Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Gramata Publishing, Depok, 2010.

Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Tintamas, Cet.I, Jakarta, 1974.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Tintamas, Cet.I, Jakarta, 1975.
- Hooker, M.B, *Adat Low in Modern Indonesia*, Oxford University Prees, Oxford, 1978.
- Edi Hudiaata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Ichtijanto, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, Dirbinperta Dep. Agama RI, Cet.I, Jakarta, 1985.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Alih Bahasa: H. Zaini Ahmad Noeh, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1979.
- Manna' al-Qattan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, Muassasah al-Risalah, t.t.
- Manan, Abdul, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di lingkungan Peradilan Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Manan, Baqir, *Kebijakan Mahkamah Agung dalam perkara-perkara Syari'ah setelah Satu Atap, dalam Ahmad Kamil (ed). Teori akad dan Aspek-aspek Hukum Bisnis dalam ekonomi Syari'ah*, 2006.
- Manan, Baqir, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005.
- Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Mas'ud, Muhammad Khaled, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan Yudian W. Asmin, Ikhlas, Surabaya, 1995.
- MD, Moh. Mahfud, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Jogjakarta, 1993.
- Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Muhammad, Ahsin Sakho, *Mushaf Maqamat*, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2013.
- Nabhan, Muhammad Faruq, *al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*, Dar al-Qolam, Beirut, 1981
- Naim, Mochtar, *Kompendium Himpunan Ayat-ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Hukum*, Hasanah, Jakarta, 2001.
- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1983.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1985.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Podgorecki, Adam dan Christopher J. Whelan "Sociological Approaches to Law", terj. Rnc. Widyaningsih dan Kartasapoetra, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, Tasikmalaya, 2009.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Struktur Hukum Modern*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Rosadi, Aden, *Peradilan Agama Di Indonesia, Dinamika Pembentukan Hukum*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015.
- Rosyadi, A. Rahmat dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Sabrie, Zuffran, *Peradilan Agama di Indonesia, Eksistensi Peradilan Agama, Studi tentang Pelaksanaan Hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam*.

Sabrie, Zuffran, *Pengadilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, Departemen Agama, RI, Jakarta, 1999.

Saghir, Syafi'i, *Nihayatul Muhtaj*.

Samsuar, *Zakat dan Pajak dalam Filsafat Islam*, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2005.

Sosroatmodjo, H. Arso dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Shiddieqi, Hasbi Ash, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT Ma'arif, Yogyakarta, 1994.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Soekanto, Soerjono, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1991.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Suminto, H. Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, LP3ES, Jakarta, 1985.

Suny, Ismail, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 1987.

Suny, Ismail, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dalam Eddi Rusdiana Arief (Peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Susanto, Noto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1963.

Syadzali, Munawir, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam Dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*, dalam Tjun Surjaman.

Syah, Ismail Muhammad, *Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Aceh, Dahulu, Sekarang, dan Nanti dalam Ismail Suny*, Bunga Rampai tentang Aceh, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1980.

Thalib, Sayuti, *Receptio a Contrario*, Bina Aksara, Cet.III, Jakarta, 1980.

Umar, Abdur Rahman, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1986.

William A. Shrode and Dan Voich, *Organization and Management; Basic System Concepts*, Irwin Book Co., Malaysia, 1974.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Disertasi:

Zuffran Sabrie, *Eksistensi Peradilan Agama, Studi tentang Pelaksanaan Hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam*, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2003.

Makalah dan Majalah:

Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012)*, dalam Majalah Peradilan Agama edisi 3 Desember 2013-Februari 2014.

Irsyad, Syamsuhadi, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, makalah, 10 Juli 2006.

Ka'bah, Rifyal, "*Studi Banding Hukum Ekonomi Syariah ke Beberapa Negara*" makalah disampaikan pada seminar tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Yogyakarta, 10 September 2008.

Manan, Abdul, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, makalah disajikan pada Diskusi Panel Fakultas Hukum Universitas YARSI, 14 Maret 2007.

Mubarok, *Memahami Lembaga Peradilan Agama*, "Makalah pada Acara Pemahaman Undang-Undang Pengadilan Agama Departemen Hukum dan HAM RI, tanggal 7 September 2006 di Yogyakarta.

Prof. Mahadi, *Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan*, dalam Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, No. 3 Tahun II (Maret 1969).

Taufik, *Sumber Hukum Ekonomi Syariah*, Makalah yang disampaikan pada Acara Semiloka Syariat, Hotel Grand Alia Jakarta, 20 November 2006, h. 6-7.

Widiana, Wahyu, *Pasang Surut Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia*, Makalah Kuliah Umum UNISMA Malang, 17 April 2004.

Jurnal:

Wantu, Fence M, "*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.

Artikel:

Cakim PPC II

Sumber Internet:

www.badilag.net

<http://ahmadsonyirawan.blogspot.co.id/2014/12/syariat-islam-dan-teori-teori.html>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29466/4/Chapter%20I.pdf>

http://www.slideshare.net/Ronalto_Tan/13-kewenangan-mengadili

<https://ndahindahndah.wordpress.com/2012/07/11/kewenangan-mengadili-kompetensi/>

<http://umamkhotibul400.blogspot.co.id/2012/07/teori-eksistensi-hukum-islam-di.html>

<http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/84/81>

www.mozaikislam.com

